

**IMPLEMENTASI PASAL 3 HURUF B ANGKA 46 PERATURAN
WALIKOTA MALANG NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG
PENDELEGASIAN KEWENANGAN PERIZINAN DAN
NONPERIZINAN DARI WALIKOTA KEPADA KEPALA DINAS
TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

**(Studi di Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

FITRAH AL RIZKY

NIM. 175010101111077



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2021

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi

: IMPLEMENTASI PASAL 3 HURUF B ANGKA 46

PERATURAN WALIKOTA MALANG NOMOR 3 TAHUN

2020 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN

PERIZINAN DAN NONPERIZINAN DARI WALIKOTA

KEPADA KEPALA DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN

MODAL, DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

(Studi di Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal, dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang)

Identitas Penulis

a. Nama : Fitrah Al Rizky

b. NIM : 175010101111077

Konsentrasi : Hukum Administrasi Negara

Jangka Waktu Penelitian : 4 Bulan

Disetujui pada tanggal : 27 Mei 2021

Pembimbing Utama



Lutfi Effendi, S.H., M.Hum.

NIP. 196008101986011002

Pembimbing Pendamping



Dr. Shinta Hadiyantina, S.H., M.H.

NIP. 197703052009122001

Mengetahui,
Ketua Departemen HAN



Lutfi Effendi, S.H., M.Hum.

NIP. 196008101986011002

HALAMAN PENGESAHAN
IMPLEMENTASI PASAL 3 HURUF B ANGKA 46 PERATURAN WALIKOTA
MALANG NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PENDELEGASIAN
KEWENANGAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN DARI WALIKOTA
KEPADA KEPALA DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL, DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

(Studi di Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kota Malang)

Oleh :
Fitrah Al Rizky

NIM. 175010101111077

Skripsi ini telah disahkan oleh Majelis Penguji pada tanggal : 16 Juni 2021

Pembimbing Utama



Lutfi Effendi, S.H., M.Hum.

NIP. 196008101986011002

Pembimbing Pendamping



Dr. Shinta Hadiyantina, S.H., M.H.

NIP. 197703052009122001

Mengetahui,
Ketua Departemen HAN



Lutfi Effendi, S.H., M.Hum.

NIP. 196008101986011002

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis haturkan kepada Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu dan tanpa ada halangan yang berarti. Sholawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan Nabi besar, Nabi Muhammad SAW karena berkat syafaatnya kita dapat merasakan iman dan islam, serta berkesempatan untuk menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Selain itu, penulis khususnya ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua penulis yaitu Bapak Husen Purwanto dan Ibu Maimunah yang dengan tulus dan ikhlas membimbing, mendoakan, dan memotivasi setiap perbuatan yang penulis lakukan, serta untuk kakak penulis Felysia Enggawati dan Kiki Dwi Fitrianty serta dan adik penulis Galak Ragil Husein yang selalu memberikan dukungan dan doa serta motivasi yang luar biasa dalam penulisan ini.

Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan doa dari berbagai pihak, yang secara pribadi penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Dr. Muchamad Ali Safa'at, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Bapak Lutfi Effendi, S.H., M.Hum. selaku Ketua Departemen Hukum Administrasi Negara dan selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah meluangkan waktu dan tenaganya untuk memberikan bimbingan dan arahan secara baik dan sabar kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Ibu Dr. Shinta Hadiyantina, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang senantiasa meluangkan waktu dan tenaganya untuk memberikan solusi dan arahan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang telah memberikan ilmu, pengetahuan, wawasan, dan pengalaman yang luar biasa selama masa studi.
5. Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang yang telah memberikan izin dan partisipasinya sehingga

penulis dapat melaksanakan penulisan ini tanpa adanya halangan yang berarti.

6. Sahabat-sahabat penulis selama duduk dibangku perkuliahan Annisa Himmah Witjayanti, Eva Wijayanti, Maryorie Dagna Tertia, Wahyu Nur Fajar Pratiwi, dan Ahmad Maulana Rafiq yang sudah memahami dan membantu penulis dalam bentuk apapun selama masa perkuliahan dan ikut menjadi tempat bertukar pikiran terkait penulisan skripsi ini.

7. Teman-teman Program Fast track FHUB 2020, Salma Hanita Putri, Tata Pelita dan Theo Sifra Ahasia yang telah memberikan semangat dan inspirasi dalam menyelesaikan penulisan ini.

8. Seluruh pihak yang telah berperan banyak dalam membantu, dan memberikan dukungannya baik secara moril maupun doa-doa yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari segala kekurangan serta keterbatasan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan agar skripsi ini dapat mengarah kepada satu perbaikan yang lebih baik. Semoga skripsi ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan yang bermanfaat bagi penulis dan pembacanya.

Akhir kata, penulis mengharapkan semoga tujuan dari penulisan skripsi ini dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan.

Malang, 16 April 2021

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Halaman Persetujuan	ii
Halaman Pengesahan	iii
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	vi
Daftar Tabel	ix
Daftar Grafik	x
Daftar Gambar	xi
Daftar Lampiran	xii
Ringkasan	xiii
Summary	xiv

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang	1
B. Orisinalitas Penelitian	7
C. Rumusan Masalah	13
D. Tujuan Penelitian	13
E. Manfaat Penelitian	14
F. Metode Penelitian	15
1. Jenis Penelitian	15
2. Pendekatan Penelitian	16
3. Lokasi Penelitian	16
4. Jenis Data	17
5. Teknik Pengumpulan Data	18
6. Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel	20
7. Teknik Analisis Data	21
8. Sistematika Penulisan	23

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 25

A. Tinjauan Umum Mengenai Implementasi	25
B. Tinjauan Umum Mengenai Wewenang	29
C. Tinjauan Umum Mengenai Perizinan	31
D. Tinjauan Umum Mengenai Pangan	32
E. Tinjauan Umum Mengenai Industri Rumah Tangga	34
F. Tinjauan Umum Mengenai Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	37

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN 41

A. Gambaran Umum Kota Malang	41
B. Gambaran Umum Dinas Tenaga Kerja dan PMPTSP Kota Malang	44
C. Pembahasan	48
1. Implementasi Pasal 3 Huruf B Angka 46 Peraturan Walikota Malang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan dari Walikota Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	48
2. Kendala serta hambatan yang dihadapi oleh Dinas Tenaga Kerja dan PMPTSP Kota Malang dalam mengimplementasikan Pasal 3 Huruf B Angka 46 Peraturan Walikota Malang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan dari Walikota Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	85
3. Upaya yang dilakukan Dinas Tenaga Kerja dan PMPTSP Kota Malang dalam mengimplementasikan Pasal 3 Huruf B Angka 46 Peraturan Walikota Malang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan dari Walikota Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	90

BAB IV PENUTUP 92

A. Kesimpulan	92
B. Saran	94

Daftar Pustaka
Lampiran

96
99





DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Orisinalitas Penelitian.....	7
Tabel 3.1 Data Jumlah Penduduk Kota Malang.....	43
Tabel 3.2 Kategori Level Hasil Pemeriksaan Sarana Produksi IRTP.....	64
Tabel 3.3 Kode Kemasan Pangan IRT.....	66
Tabel 3.4 Kode Jenis Pangan IRTP.....	67





DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1 Pengetahuan Pegawai Dinas Tenaga Kerja dan PMPTSP Kota Malang terkait Pendelegasian Wewenang Izin Kesehatan.....51

Grafik 3.2 Sumber Informasi Pendelegasian Wewenang Pengurusan Izin Kesehatan 52

Grafik 3.3 Pengetahuan Pegawai Dinas Tenaga Kerja dan PMPTSP Kota Malang terkait SPP-IRT.....53

Grafik 3.4 Faktor Pendukung Pendelegasian Wewenang Pengurusan Izin SPP-IRT di Dinas Tenaga Kerja dan PMPTSP Kota Malang.....80

Grafik 3.5 Jenis Hambatan.....86



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Peta Rencana Tata Guna Lahan Kota Malang	42
Gambar 3.2 Struktur Organisasi	47
Gambar 3.3 Desk Pelayanan Nomor 12 Dinas Tenaga Kerja dan PMPTSP Kota Malang	55
Gambar 3.4 Formulir SPP-IRT Pemerintah Kota Malang	56
Gambar 3.5 Label Kemasan Produk IRTP Kota Malang	58
Gambar 3.6 Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan Pemerintah Kota Malang	63



LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuesioner Penelitian

Lampiran 2 Daftar Responden Penelitian

Lampiran 3 Foto Kegiatan Penelitian Penulis



RINGKASAN

Fitrah Al Rizky, Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, April 2021, IMPLEMENTASI PASAL 3 HURUF B ANGKA 46 PERATURAN WALIKOTA MALANG NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN DARI WALIKOTA KEPADA KEPALA DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL, DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (Studi di Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang), Lutfi Effendi, S.H.,M.Hum., Dr. Shinta Hadiyantina, S.H.,M.H.

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan pada Pasal 3 Huruf B Angka 46 Peraturan Walikota Malang Nomor 3 Tahun 2020. Pilihan tema tersebut dilatarbelakangi oleh banyaknya pengaduan atau keluhan dari masyarakat, terutama pelaku IRTP di Kota Malang yang sedang melakukan pengajuan permohonan penerbitan SPP-IRT. Pengajuan permohonan penerbitan yang diajukan tersebut, belum dapat diproses oleh Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang. Padahal berdasarkan pada ketentuan di dalam Pasal 3 Huruf B Angka 46 Peraturan Walikota Malang Nomor 3 Tahun 2020 telah dijelaskan bahwa Walikota telah mendelegasikan wewenang penerbitan SPP-IRT kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang.

Berdasarkan hal tersebut diatas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah : (1) Bagaimana Implementasi Pasal 3 Huruf B Angka 46 Peraturan Walikota Malang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Dari Walikota Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu? (2) Apa kendala serta upaya yang dihadapi oleh Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang dalam mengimplementasikan Pasal 3 Huruf B Angka 46 Peraturan Walikota Malang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Dari Walikota Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu? Kemudian penulisan karya tulis ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris dengan pendedekatan penelitian yuridis sosiologis yang dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan.

Dari hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang sebagai penerima delegasi serta implementor dalam penerbitan SPP-IRT belum sepenuhnya mengimplementasikan wewenang serta kewajibannya sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 3 Huruf B Angka 46 Peraturan Walikota Malang Nomor 3 Tahun 2020. Hal tersebut dikarenakan terdapat kendala atau hambatan yang menyebabkan norma yang penulis gunakan sebagai acuan tidak dapat terselenggara dengan dengan baik atau maksimal.

Kata kunci: Implementasi, Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga, Disnaker PMPTSP Kota Malang.

SUMMARY

Fitrah Al Rizky, State Administrative Law, Faculty of Law, Universitas Brawijaya, April 2021, IMPLEMENTATION OF ARTICLE 3 LETTER B POINT 46 OF MAYOR REGULATION OF MALANG NUMBER 3 OF 2020 CONCERNING ENTRUSTING PERMIT AND NON-PERMIT AUTHORITY FROM THE CITY MAYOR TO THE HEAD OF LABOR, INVESTMENT, AND ONE-STOP SERVICES AGENCY IN MALANG (A study in Labor, Investment, and One-Stop Services Agency in Malang), Lutfi Effendi, S.H., M.Hum., Dr. Shinta Hadiyantina, S.H., M.H.

Studying the issue as in the provision of Article 3 Letter B point 46 of Mayor Regulation Number 3 of 2020, this research departs from grievances coming from those running the food home industry (henceforth IRTP) in their progress of requesting the issuance of SPP-IRT. This proposal, however, cannot be proceeded by Labor, Investment, and One-Stop Services Agency in Malang city, contravening the provision of Article 3 Letter B Number 46 of the Mayor Regulation of Malang Number 3 of 2020 implying that the Mayor of the city has delegated the authority to issue SPP-IRT to the Head of the agency in the city.

Referring to the above issue, this research is intended to find out: (1) how is Article 3 Letter B point 46 of Mayor Regulation of Malang Number 3 of 2020 implemented? (2) what are the impeding factors faced by the agency in implementing Article 3 Letter B Point 46 of Mayor Regulation of Malang? With an empirical juridical method and socio-juridical approach linked to legislation, this research reveals that the agency has not fully implemented the provision of Article 3 Letter B Point 46 of Mayor Regulation of Malang Number 3 of 2020 due to several impeding factors that interrupt the optimal enforcement of the norms.

Keywords: Implementation, food home industry certificate, Disnaker PMPTSP of Malang city.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 merupakan suatu dasar konstitusi bagi bangsa Indonesia. Segala penyelenggaraan negara harus berlandaskan pada Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 tersebut. Hal ini disebabkan karena di dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia terkandung nilai-nilai yang berasal dari pemikiran bangsa. Sehingga segala peraturan perundang-undangan pun harus memiliki keselarasan dan tidak boleh bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Pun juga di dalam pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia, telah disebutkan bahwa salah satu tujuan pembentukan Pemerintah Negara Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Hal ini dikarenakan kesejahteraan umum di dalam suatu negara berperan sangat penting sehingga setiap negara berupaya dengan maksimal untuk mencapai kesejahteraan umum di negaranya.

Berbicara tentang kesejahteraan umum, maka akan selalu berkaitan dengan perekonomian nasional. Hal ini selalu berkaitan karena untuk mencapai kesejahteraan umum bagi warga negaranya, suatu negara harus dapat membawa perekonomian nasionalnya ke dalam tingkatan yang baik. Dengan kata lain, perekonomian nasional tidak hanya dikuasai atau terpusat pada satu bidang saja, namun terdapat pemerataan di dalam penguasaan perekonomian nasional. Hal tersebut sejalan dengan apa yang tertulis di dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang menyatakan :

*"Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional."*¹

Dengan melihat kepada pengaturan yang telah diterangkan di dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tersebut di atas, maka

¹ Pasal 33 ayat 4 **Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**

dapat dikatakan bahwa di dalam membangun perekonomian nasional seharusnya dilakukan berdasarkan atas usaha bersama, baik antara pemerintah, badan usaha, maupun pelaku usaha seperti Industri Rumah Tangga. Sehingga untuk membangun perekonomian nasional yang bertujuan untuk memberi kesejahteraan bagi seluruh warga negaranya, negara juga harus memfasilitasi kegiatan perekonomian yang dilakukan oleh pelaku usaha kecil, termasuk di dalamnya yaitu kegiatan perekonomian yang diselenggarakan dalam bentuk industri rumah tangga. Frasa memfasilitasi tersebut di atas tidak hanya terbatas pada penyediaan sarana prasarana, maupun dukungan modal saja, namun juga termasuk proses perizinan sehingga industri rumah tangga dapat menjalankan kegiatan usahanya dengan berdasar atas izin sebagai payung hukumnya.

Indonesia sebagai negara yang berbentuk kesatuan memiliki prinsip otonomi daerah yang artinya terdapat pembagian hak, wewenang, dan kewajiban bagi penyelenggara negara baik di pusat maupun di daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya.² Selain pembagian urusan pemerintahan antara pusat dan daerah, Indonesia juga memiliki pembagian tugas dan/atau bidang yang dituangkan dalam bentuk institusi-institusi atau lembaga pemerintah kementerian maupun non kementerian yang memiliki tugas, wewenang, peran serta tanggung jawab masing-masing. Misalnya, dalam hal pengawasan obat dan makanan diserahkan kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan (yang selanjutnya disebut dengan BPOM) yang mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³ Pengawasan terhadap obat dan makanan yang diselenggarakan oleh BPOM tersebut merupakan salah satu upaya dalam perlindungan serta peningkatan kualitas hidup masyarakat

² Pasal 1 angka 6 **Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah menjadi Undang Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah.**

³ Pasal 2 ayat 1 **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan.**

Indonesia. Selain itu, pengawasan terhadap obat dan makanan juga memiliki fungsi untuk mendukung daya saing nasional.

Salah satu bentuk dari kewenangan yang dimiliki oleh daerah adalah dalam hal perizinan. Perizinan diperlukan di dalam setiap penyelenggaraan negara agar supaya pemerintah daerah dapat mengendalikan setiap perilaku atau kegiatan yang dilakukan oleh individu atau golongan di daerahnya. Pengendalian melalui perizinan merupakan pengendalian yang bersifat preventif yang termasuk sebagai usaha yang dilakukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan terhadap norma dan nilai sosial yang berlaku di masyarakat di daerah. Di dalam kamus istilah hukum, izin (*vergunning*) dijelaskan sebagai perkenaan atau izin dari pemerintah yang disyaratkan untuk perbuatan yang pada umumnya memerlukan pengawasan khusus.⁴ Perizinan merupakan salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Perizinan dapat berbentuk pendaftaran, rekomendasi, sertifikat penentuan kuota dan izin untuk melakukan suatu usaha yang biasanya harus dimiliki atau diperoleh suatu organisasi perusahaan atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan.⁵ Hal tersebut sejalan dengan pengaturan yang terdapat di dalam Undang Undang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan :

"Keputusan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berbentuk izin apabila :

- a. diterbitkan persetujuan sebelum kegiatan dilaksanakan; dan*
- b. kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan kegiatan yang memerlukan perhatian khusus dan/atau memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan."*⁶

Salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik di dalam lingkup pemerintah daerah adalah terkait dengan perizinan. Pengurusan perizinan saat ini telah memperoleh peran serta kedudukan utama dalam

⁴ HR Ridwan, **Hukum Administrasi Negara**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm 198.

⁵ Adrian Sutedi, **Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik**, Rajawali, Jakarta, 2009, hlm 18.

⁶ Pasal 39 Ayat 2 **Undang Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan**.



kehidupan bermasyarakat. Hal ini dikarenakan izin merupakan keputusan pejabat pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan warga masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁷ Sehingga izin nantinya akan berlaku sebagai legalitas atas segala tindakan atau kegiatan yang akan dilakukan oleh warga masyarakat. Perizinan, walaupun tak dibutuhkan setiap hari, sangatlah berperan penting bagi kehidupan kita. Tanpanya, banyak hal yang tak dapat kita lakukan karena izin adalah bukti penting secara hukum. Tidak ada bagian lain dalam domain publik yang berperan sebagai tempat interaksi yang begitu jelas dan langsung antara pemerintah dan masyarakatnya selain pada bagian pelayanan perizinan. Sebagai garda terdepan atas pelayanan pemerintah terhadap masyarakat, dapat dikatakan kinerja pemerintah secara keseluruhan benar-benar dinilai dari seberapa baik pelayanan unit perizinan ini.⁸

Perizinan sebagai salah satu kewenangan pemerintah, cakupannya tidak hanya pada satu aspek kehidupan saja. Namun, hampir seluruh aspek kehidupan bermasyarakat diatur melalui sistem perizinan. Sebagai contoh misalnya di dalam bidang kesehatan, terdapat banyak pengaturan yang termasuk di dalam izin kesehatan, salah satunya adalah terkait pengurusan perizinan serta penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga atau yang selanjutnya disebut dengan SPP-IRT. SPP-IRT ini diperlukan bagi pelaku usaha Industri Rumah Tangga Pangan atau selanjutnya disebut dengan IRTP sebagai legalitas untuk memproduksi suatu produk pangan. Saat ini, IRTP termasuk ke dalam salah satu industri yang memiliki potensi serta prospek yang baik untuk dikembangkan oleh masyarakat. Hal ini dikarenakan kebutuhan pangan termasuk ke dalam kebutuhan primer dalam menjalani kehidupan manusia, selain kebutuhan sandang serta papan. Sehingga kebutuhan terkait pangan dapat menjadi peluang industri yang menjanjikan.

Wewenang terkait penerbitan SPP-IRT berada di tangan Bupati dan/atau Walikota di masing-masing daerah. Wewenang tersebut nantinya

⁷ *Ibid.*, Pasal 1 angka 19.

⁸ Fahmi Wibawa, **Panduan Praktis Perizinan Usaha Terpadu**, Grasindo, Jakarta, 2007, hlm 7.

oleh Bupati dan/atau Walikota akan didelegasikan kepada Dinas Kesehatan pada masing-masing daerah tersebut. Ketentuan tersebut juga berlaku pada pemerintah daerah Kota Malang. Dimana Walikota Malang mendelegasikan wewenang penerbitan SPP-IRT kepada Dinas Kesehatan Kota Malang.

Selanjutnya, terdapat pembaharuan terkait kewenangan penerbitan SPP-IRT bagi pelaku usaha IRT di Kota Malang. Kewenangan penerbitan SPP-IRT yang pada awalnya dilakukan oleh Dinas Kesehatan, saat ini berpindah kewenangannya kepada Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang. Dalam arti lain, penerbitan SPP-IRT yang merupakan salah satu kewenangan Pemerintah Kota Malang saat ini telah didelegasikan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang.⁹ Hal tersebut sebagaimana telah diterangkan di dalam Peraturan Walikota Malang Nomor 03 Tahun 2020 yang menyatakan sebagai berikut :

"Jenis-jenis Perizinan dan Nonperizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Malang di bidang Kesehatan yang kemudian didelegasikan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yaitu Penerbitan SPP-IRT."¹⁰

"Walikota mendelegasikan kewenangan perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 kepada Kepala Dinas."¹¹

Dimana pelaksanaan pendelegasian kewenangan penerbitan SPP-IRT kepada Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang tersebut mulai berlaku terhitung sejak tanggal 17 Februari 2020.

Pengajuan permohonan penerbitan SPP IRT di Kota Malang dapat dikatakan mengalami peningkatan pada masa pandemi Covid 19 saat ini. Hal ini disebabkan karena banyaknya masyarakat yang kehilangan pekerjaan pada masa pandemi Covid 19. Sehingga masyarakat harus mencari pekerjaan lain dan/atau membuka usaha untuk kelangsungan hidupnya. Dan nampaknya, IRTP merupakan salah satu usaha yang banyak dipilih oleh masyarakat.

⁹ Pasal 3 Huruf B Angka 46 **Peraturan Walikota Malang Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Dari Walikota Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.**

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*, Pasal 4 Ayat 1.

Sebelumnya, patut diketahui bahwa di dalam pengajuan permohonan penerbitan SPP-IRT, pelaku usaha IRTP sebagai pemohon harus melalui beberapa tahapan. Salah satunya adalah tahap Penyuluhan Keamanan Pangan atau selanjutnya disebut dengan PKP. Meskipun kewenangan penerbitan SPP-IRT telah berada pada Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, namun penyelenggaraan PKP tetap berada pada Dinas Kesehatan. Sehingga diperlukan koordinasi antar dinas agar supaya proses di dalam pelaksanaan penerbitan SPP-IRT di Kota Malang dapat terlaksana dengan baik. PKP sebagai salah satu syarat dan/atau tahapan di dalam proses penerbitan SPP-IRT pada tahun 2020 ini masih berlangsung sedikitnya sebanyak 1 (satu) kali saja, yakni diselenggarakan tepatnya pada tanggal 10 Agustus 2020.

Penyelenggaraan PKP yang baru diselenggarakan 1 (satu) kali tersebut menyebabkan terkendalanya proses penerbitan SPP-IRT. Hal ini dikarenakan berkas permohonan yang diajukan pemohon dalam hal permohonan penerbitan SPP-IRT terhitung sejak tanggal 11 Agustus 2020, belum bisa diproses karena pemohon tersebut belum pernah mengikuti PKP. Padahal jika melihat pengaturan yang telah diatur di dalam Pasal 3 Huruf B Angka 46 *jo* Pasal 4 Peraturan Walikota Malang Nomor 03 Tahun 2020, pelaksanaan penerbitan SPP-IRT seharusnya dapat diproses sesuai dengan standar pelayanan instansi terkait. Namun dalam kenyataannya, Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu belum bisa memproses berkas permohonan tersebut sampai waktu yang tidak bisa ditentukan. Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai instansi pelayanan publik yang memiliki kewenangan di dalam penerbitan SPP-IRT saat ini, hanya memberi saran kepada pemohon agar pemohon tersebut mengajukan kembali permohonan penerbitan SPP-IRT nya pada tahun 2021 mendatang.

Dengan melihat pengaturan yang telah tertulis di dalam Peraturan Walikota tersebut dengan apa yang terjadi di kenyataan serta banyaknya keluhan dan aduan masyarakat sebagai pemohon terkait dengan

permasalahan penundaan atau dengan kata lain belum bisa diprosesnya penerbitan SPP-IRT pada saat ini, menjadikan latar belakang penulis untuk mengkaji lebih dalam mengenai pelaksanaan penerbitan SPP IRT, kendala atau hambatan, serta solusi di dalam permasalahan ini.

B. Orisinalitas Penelitian

Tabel 1.1 Orisinalitas Penelitian

Nama	Universitas / Fakultas/ Tahun	Judul	Rumusan Masalah	Pembeda
Ahmad Hanif	Universitas Negeri Semarang/ Fakultas Hukum/ 2017	Implementasi Peraturan BPOM Nomor HK.03.1.23.04.12.2 205 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangan (P-IRT) Di Kabupaten Pemalang	1. Bagaimana Prosedur Mendapatkan Izin Sertifikat P-IRT Bagi Pengusaha Produk Industri Rumah Tangga ? 2. Bagaimanakah Implementasi Keputusan Peraturan BPOM No Hk. 00.05.5.1639 tentang Pedoman Cara Produksi	Fokus dalam penelitian tersebut yaitu menganalisis terkait implementasi peraturan BPOM Nomor HK.03.1.23.04.12.2205 Tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangan (P-IRT) dan Keputusan Peraturan BPOM Nomor 00.05.5.1639

Nama	Universitas / Fakultas/ Tahun	Judul	Rumusan Masalah	Pembeda
			<p>Pangan Yang Baik Untuk Industri Rumah Tangga (CPPB-IRT) di Kabupaten Pemalang?</p>	<p>tentang Pedoman Cara Produksi Pangan Yang Baik Untuk Industri Rumah Tangga (CPPB-IRT) Di Kabupaten Pemalang. Sedangkan penulis hendak menganalisis terkait Implementasi Pasal 3 Huruf B Angka 46 Peraturan Walikota Malang Nomor 3 Tahun 2020 Terkait Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan kendala serta hambatan yang dihadapi oleh Dinas Tenaga Kerja,</p>

Nama	Universitas / Fakultas/ Tahun	Judul	Rumusan Masalah	Pembeda
				<p>Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang dalam menerapkan Pasal 3 Huruf B Angka 46 Peraturan Walikota Malang Nomor 3 Tahun 2020 tersebut.</p>
Siti Nur Asyah	Universitas Muhammadiyah Malang/ Fakultas Hukum/ 2018	Pelaksanaan Pembinaan Pelaku Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) Di Kota Malang (Studi Di Dinas Kesehatan Kota Malang)	1. Bagaimana upaya pembinaan terhadap pelaku industri rumah tangga pangan (IRTP) yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Malang dalam rangka mewujudkan keamanan pangan produk	Fokus dalam penelitian tersebut yaitu menganalisis upaya pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Malang terhadap pelaku industri rumah tangga pangan (IRTP) dalam rangka mewujudkan keamanan pangan produk

Nama	Universitas / Fakultas/ Tahun	Judul	Rumusan Masalah	Pembeda
			<p>RT bagi masyarakat?</p> <p>2. Bagaimana upaya mengatasi kendala-kendala yang timbul baik kendala internal atau eksternal dalam mewujudkan tujuan pembinaan (IRTP) di kota Malang?</p>	<p>rumah tangga bagi masyarakat serta upaya mengatasi kendala-kendala yang timbul baik kendala internal atau eksternal dalam mewujudkan tujuan pembinaan (IRTP) di kota Malang. Sedangkan penulis hendak menganalisis terkait Implementasi Pasal 3 Huruf B Angka 46 Peraturan Walikota Malang Nomor 3 Tahun 2020 Terkait Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga</p>

Nama	Universitas / Fakultas/ Tahun	Judul	Rumusan Masalah	Pembeda
				dan kendala serta hambatan yang dihadapi oleh Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang dalam menerapkan Pasal 3 Huruf B Angka 46 Peraturan Walikota Malang Nomor 3 Tahun 2020 tersebut.
Adika Puspita Guna	Universitas Muhammadiyah Malang/ Fakultas Hukum/ 2019	Penegakan Hukum Perizinan Peredaran Produk Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen di Kota Malang	1. Bagaimana prosedur perizinan peredaran produk Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) di Kota Malang?	Fokus dalam penelitian tersebut yaitu menganalisis terkait penegakan hukum perizinan peredaran produk pangan industri rumah tangga dalam perspektif perlindungan

Nama	Universitas / Fakultas/ Tahun	Judul	Rumusan Masalah	Pembeda
			<p>2. Bagaimana pelaksanaan penegakan hukum perlindungan konsumen produk Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) di Kota Malang ?</p> <p>3. Bagaimana permasalahan yang terjadi dan upaya apa yang dilakukan oleh penegak hukum dalam menegakkan perlindungan konsumen produk Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) di Kota Malang ?</p>	<p>konsumen di Kota Malang. Sedangkan penulis hendak menganalisis terkait Implementasi Pasal 3 Huruf B Angka 46 Peraturan Walikota Malang Nomor 3 Tahun 2020 Terkait Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan kendala serta hambatan yang dihadapi oleh Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang dalam menerapkan</p>

Nama	Universitas / Fakultas/ Tahun	Judul	Rumusan Masalah	Pembeda
				Pasal 3 Huruf B Angka 46 Peraturan Walikota Malang Nomor 3 Tahun 2020 tersebut.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Pasal 3 Huruf B Angka 46 Peraturan Walikota Malang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan dari Walikota Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu?
2. Apa kendala serta upaya yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang dalam mengimplementasikan Pasal 3 Huruf B Angka 46 Peraturan Walikota Malang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan dari Walikota Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis Implementasi Pasal 3 Huruf B Angka 46 Peraturan Walikota Malang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan dari Walikota Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala serta hambatan yang dihadapi oleh Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang dalam mengimplementasikan Pasal 3 Huruf B Angka 46 Peraturan Walikota Malang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan dari Walikota Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

E. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis
 - a. Memberikan bahan untuk menunjang pengembangan ilmu hukum khususnya mengenai Implementasi Pasal 3 Huruf B Angka 46 Peraturan Walikota Malang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan dari Walikota Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
2. Secara Praktis
 - a. Bagi Pemerintah Daerah
Dapat dijadikan sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah Kota Malang dalam membuat dan mengambil kebijakan terkait dengan pelaksanaan penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) pasca pendelegasian kewenangan perizinan dan nonperizinan dari Walikota kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang.
 - b. Bagi Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang
Dapat dijadikan acuan dalam penerapan Pasal 3 Huruf B Angka 46 Peraturan Walikota Malang Nomor 3 Tahun 2020 Terkait Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) pasca pendelegasian kewenangan perizinan dan nonperizinan dari Walikota

kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang.

c. Bagi Masyarakat

Dapat menjadi bahan referensi serta menambah wawasan, untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terkait dengan mekanisme penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) pasca pendelegasian kewenangan perizinan dan nonperizinan dari Walikota kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini didasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris merupakan suatu pendekatan yang mengacu pada peraturan-peraturan tertulis untuk kemudian dilihat bagaimana implementasinya di lapangan.¹² Dengan kata lain, jenis penelitian ini juga mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.¹³ Penelitian yuridis empiris ini dilaksanakan pada keadaan sebenarnya dalam masyarakat dengan tujuan untuk mengetahui fakta-fakta atau data (*fact finding*) yang dibutuhkan, sehingga nantinya fakta dan data yang ditemukan itu dapat dirumuskan sebagai upaya penyelesaian permasalahan (*problem identification*) yang terjadi. Di dalam penelitian yang membahas tentang Implementasi Pasal 3 Huruf B Angka 46 Peraturan Walikota Malang Nomor 3 Tahun 2020 Terkait Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) pasca pendelegasian kewenangan perizinan dan nonperizinan dari Walikota kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang pada saat ini,

¹² Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI Press, Jakarta, 2010, hlm 34.

¹³ Suharsimi Arikunto, **Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek**, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm 126.

penelitian yuridis empiris digunakan agar supaya penulis mendapat fakta serta data yang dibutuhkan dalam melihat mengimplementasikan Pasal 3 Huruf B Angka 46 Peraturan Walikota Malang Nomor 3 Tahun 2020 serta kendala atau hambatan yang dihadapi oleh Dinas terkait dalam mengimplementasikan peraturan tersebut sekaligus untuk menemukan penyelesaian dan solusi atas permasalahan penundaan atau terhambatnya proses penerbitan SPP-IRT di Kota Malang pada saat ini.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis dalam penelitian ini menekankan pada perolehan pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung terkait Implementasi Pasal 3 Huruf B Angka 46 Peraturan Walikota Malang Nomor 3 Tahun 2020 pasca pendelegasian kewenangan perizinan dan nonperizinan dari Walikota kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang. Jadi secara yuridis, pelaksanaan penerbitan SPP-IRT pasca pendelegasian kewenangan perizinan dan nonperizinan dari Walikota kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dikaitkan dengan pengaturan di dalam Pasal 3 Huruf B Angka 46 *jo.* Pasal 4 Peraturan Walikota Malang Nomor 03 Tahun 2020, kemudian secara sosiologis pelaksanaan penerbitan SPP-IRT dikaitkan dengan keadaan nyata dalam penerbitan SPP-IRT yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai instansi pelayanan bagi masyarakat Kota Malang.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang yang berada di Perkantoran Terpadu Kota Malang Gedung A Lantai 2 yang tepatnya beralamat di Jl. Mayjend Sungkono, Kelurahan Arjowinangun, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang. Lokasi tersebut di atas dipilih oleh penulis

untuk menjadi lokasi penelitian karena kaitannya dengan pelaksanaan penerbitan SPP-IRT, dimana yang memiliki wewenang untuk menerbitkan SPP-IRT di Kota Malang adalah Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang.

4. Jenis Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber asli. Sumber asli disini diartikan sebagai sumber pertama dari mana data tersebut diperoleh. Jadi data primer merupakan suatu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti (atau petugasnya) dari sumber pertamanya.¹⁴ Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan proses wawancara (*indepth interview*) dan pembagian kuesioner kepada responden. Data primer pada penelitian ini diperoleh langsung dari lokasi penelitian, yakni di Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang, yang bersumber dari Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan serta Bidang Pengendalian, Pengaduan, Data dan Informasi Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang. Data primer yang dicari adalah bagaimana Implementasi Pasal 3 Huruf B Angka 46 Peraturan Walikota Malang Nomor 3 Tahun 2020 atau dapat pula disebut dengan pelaksanaan kewenangan penerbitan SPP-IRT pasca pendelegasian kewenangan perizinan dan nonperizinan dari Walikota kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta apa kendala maupun hambatan yang dihadapi oleh Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam pelaksanaan penerbitan SPP-IRT di Kota Malang.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang telah tersedia baik yang bersumber pada literatur, peraturan perundang-undangan, jurnal,

¹⁴ *Ibid.*, hlm 129.

risalah sidang dan lain-lain yang memiliki relasi dengan permasalahan yang dibahas di dalam penelitian ini. Data sekunder yang digunakan oleh penulis di dalam mengkaji dan menganalisis permasalahan dalam penelitian ini antara lain adalah :

a. Peraturan Perundang-Undangan

1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009
2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017
5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2018
6. Peraturan Walikota Malang Nomor 03 Tahun 2020

b. Bahan-bahan yang diperoleh dari buku

c. Bahan-bahan yang diperoleh dari jurnal

d. Bahan-bahan yang diperoleh dari internet

3. Data Tersier

Data tersier merupakan data yang bertujuan untuk memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap data primer serta sekunder. Data tersier yang berkaitan dengan penelitian ini diantaranya adalah ensiklopedia dan kamus.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Karena tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan melalui berbagai cara. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi wawancara, studi dokumentasi, pengamatan dan/atau observasi.

1. Wawancara

Wawancara yang dilakukan ini sebagai suatu percakapan dengan suatu tujuan, yang bertujuan antara lain untuk mengumpulkan informasi.

Wawancara di dalam penelitian ini ditujukan agar supaya nantinya penerbitan SPP-IRT di Kota Malang dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sehingga implementasi terhadap Pasal 3 Huruf B Angka 46 Peraturan Walikota Malang Nomor 3 Tahun 2020 dapat terlaksana dengan baik dan tidak lagi terkendala dan/atau terhambat karena suatu faktor tertentu.

2. Kuesioner

Di dalam penelitian ini, penulis menyediakan kuesioner yang kemudian dibagikan kepada responden. Jenis kuesioner di dalam penelitian ini adalah kuesioner tertutup, yakni dengan cara menyediakan daftar pertanyaan yang mana alternatif jawabannya telah disediakan oleh penulis.

3. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan suatu teknik dalam pengumpulan data yang mana dalam teknik ini diperlukan suatu dokumen sebagai bahan untuk mempelajari suatu fenomena sehingga nantinya dapat dihasilkan data dan/atau informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Dengan artian lain, studi dokumentasi adalah kegiatan mengumpulkan dokumen dan data-data yang diperlukan dalam permasalahan penelitian kemudian ditelaah secara mendalam sehingga dapat mendukung dan menambah kepercayaan dan pembuktian suatu kejadian.¹⁵ Di dalam penelitian ini, studi dokumentasi dilakukan dengan melihat dan menganalisis dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Selain itu, studi dokumentasi di dalam penelitian ini juga dilakukan dalam bentuk pemotretan seluruh kejadian yang berlangsung selama penulis melakukan kegiatan penelitian.

¹⁵ Ridwan, **Metode & Teknik Penyusunan Tesis**, Alfabeta, Bandung, 2006, hlm 105.

4. Observasi atau pengamatan

Pengumpulan data dengan teknik observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menyatakan terus terang kepada narasumber, bahwa penulis sedang melakukan penelitian. Ini berdasarkan atas observasi dan atau pengamatan yang mana telah mendapat izin dari pihak yang bersangkutan dan terencana sehingga narasumber mengetahui kegiatan observasi yang dilakukan oleh penulis, dan juga karena penulis akan memastikan dan melakukan pengecekan ulang apakah hasil pengumpulan data dengan teknik wawancara sebelumnya itu benar apa adanya.

6. Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel

1. Populasi

Populasi yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini, penulis menentukan populasi adalah Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang.

2. Dalam penulisan penelitian ini, penulis menentukan jumlah sampel adalah :

1. 1 (satu) orang sebagai Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.
2. 1 (satu) orang sebagai Kepala Bidang Pengendalian, Pengaduan, Data dan Informasi.
3. 1 (satu) orang sebagai Kepala Seksi Verifikasi dan Validasi Bidang Perizinan dan Nonperizinan.
4. 1 (satu) orang sebagai Kepala Seksi Penetapan dan Penerbitan Bidang Perizinan dan Nonperizinan.
5. 1 (satu) orang sebagai Kepala Seksi Data dan Informasi Bidang Pengendalian, Pengaduan, Data dan Informasi.
6. 1 (satu) orang sebagai Kepala Seksi Kebijakan, Pengaduan dan Penyuluhan Layanan Bidang Pengendalian, Pengaduan, Data dan Informasi.

7. 1 (satu) orang sebagai Analis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Seksi Verifikasi dan Validasi Bidang Perizinan dan Nonperizinan.

8. 1 (satu) orang sebagai Analis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Seksi Penetapan dan Penerbitan Bidang Perizinan dan Nonperizinan.

3. Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian empirik dapat diartikan sebagai suatu proses dalam pemilihan atau penentuan sampel yang digunakan sebagai contoh. Secara konvensional, konsep sampel menunjuk pada bagian dari populasi. Akan tetapi, dalam penelitian kualitatif ini tidak bermaksud untuk menggambarkan karakteristik populasi atau menarik kesimpulan secara umum yang berlaku bagi suatu populasi, melainkan lebih berfokus kepada representasi terhadap fenomena sosial. Data atau informasi yang harus ditelusuri seluas-luasnya sesuai dengan keadaan yang ada. Dengan demikian, penulis mampu mendeskripsikan fenomena yang diteliti secara utuh.¹⁶ Dalam penelitian ini teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu *non random sampling* dengan menggunakan jenis teknik *Purposive sampling*. Hal tersebut dikarenakan penelitian ini memiliki pertimbangan-pertimbangan atau kriteria-kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh sampel-sampel yang digunakan.

7. Teknik Analisis Data

Penelitian ini adalah penelitian yang mana bentuk data yang diperoleh lebih banyak bersifat uraian, baik dari hasil wawancara maupun dari pengamatan dan/atau observasi. Data yang telah diperoleh tersebut akan dianalisis secara kualitatif serta diuraikan dalam bentuk deskriptif, sehingga dalam penelitian ini teknik analisis datanya menggunakan deskriptif kualitatif. Analisis data juga dapat dimaknai sebagai proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan

¹⁶ Burhan Bungin, **Analisis Data Penelitian Kualitatif**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm 53.

uraian dasar.¹⁷ Sehingga proses analisis data ini sangat penting peranannya dalam melakukan suatu penelitian hukum. Dapat dikatakan sebagai demikian, karena fakta dan/atau data yang dibutuhkan dalam menyelesaikan permasalahan yang diangkat di dalam penelitian ini hanya dapat digunakan sebagai bahan hukum apabila telah melalui proses analisis data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Pengumpulan data merupakan bagian integral dari kegiatan analisis data. Kegiatan pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan menggunakan wawancara, studi dokumentasi, dan pengamatan atau observasi.

2. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data, diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi dilakukan sejak pengumpulan data dimulai dengan membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema, menyusun gagasan, menulis memo dan sebagainya dengan maksud menyisihkan data/informasi yang tidak relevan.

3. Penyajian Data

Penyajian (*display*) data adalah pendeskripsian sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data kualitatif disajikan dalam bentuk teks naratif. Penyajiannya juga dapat berbentuk matrik, diagram, tabel dan bagan. Dalam penelitian ini, penulis menyajikan data kualitatif dalam bentuk deskriptif.

4. Verifikasi dan Penegasan Kesimpulan (*Conclusion Drawing and Verification*)

¹⁷ Lexy J Moleong, **Metodologi Penelitian Kualitatif**, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2010, hlm 103

Merupakan kegiatan akhir dari analisis data. Penarikan kesimpulan dapat berupa kegiatan interpretasi, yaitu menemukan makna data yang telah disajikan.¹⁸ Sehingga nantinya di dalam penelitian ini dapat dihasilkan suatu penginterpretasian data yang menguraikan terkait dengan fakta-fakta yang terjadi di lapangan.

Selain tahapan-tahapan yang telah dipaparkan tersebut di atas, juga terdapat satu proses yang bisa disebut dengan analisis data. Analisis data ini dilakukan secara berulang-ulang dan berkelanjutan yang mana di dalam proses analisis data ini ditujukan sebagai jawaban dari rumusan masalah yang ada di dalam penelitian ini. Selanjutnya data yang telah dianalisis tersebut, dapat menjadi suatu bentuk perumusan.

8. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dari penelitian ini bertujuan agar penulis dapat terarah dan sistematis. Adapun sistematika penulisan disusun sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini menguraikan tentang latar belakang, orisinalitas penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, rumusan masalah, dan metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini membahas tentang teori implementasi, tinjauan umum tentang wewenang, tinjauan umum tentang perizinan, tinjauan umum tentang pangan, tinjauan umum tentang industri rumah tangga, dan

¹⁸ Burhan Bungin, *op.cit*, hlm 70

tinjauan umum tentang sertifikat produksi pangan industri rumah tangga.

BAB III : HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan menjawab rumusan masalah yang berkaitan dengan bagaimana implementasi Pasal 3 Huruf B Angka 46 Peraturan Walikota Malang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan dari Walikota Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan kendala serta upaya apa yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang dalam mengimplementasikan Pasal 3 Huruf B Angka 46 Peraturan Walikota Malang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan dari Walikota Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Dalam bab ini juga akan menjelaskan semua hasil penelitian yang dilakukan di lapangan serta hasil wawancara dengan narasumber atau informan.

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini memuat tentang kesimpulan dari pembahasan yang dipaparkan pada bab sebelumnya, serta saran untuk menyelesaikan masalah terkait dengan hasil penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Implementasi

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap pasti. Secara sederhana implementasi bisa diartikan sebagai suatu pelaksanaan atau penerapan. Pengertian dari implementasi sendiri sebenarnya banyak dikemukakan, baik oleh para ahli maupun akademisi. Pengertian-pengertian implementasi yang telah dikemukakan oleh para ahli maupun akademisi tersebut dirasa perlu untuk penulis paparkan, dengan tujuan agar pemahaman tentang implementasi dapat disinkronisasikan dari konsep penelitian terhadap suatu kebijakan atau peraturan perundangan-undangan yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Karena implementasi merupakan kegiatan yang penting dari keseluruhan proses perencanaan kebijakan.

Implementasi juga didefinisikan sebagai pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau badan peradilan lainnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dengan berbagai cara untuk menstruktur atau mengatur proses implementasinya.¹⁹

Sementara itu, implementasi menurut para ahli didefinisikan sebagai berikut :

- a. Di dalam buku yang berjudul Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum, Nurman Usman mengemukakan pendapatnya bahwa, implementasi atau pelaksanaan adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya

¹⁹ Waluyo, **Manajemen Publik (Konsep, Aplikasi, Dan Implementasi) Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah**, Mandarmaju, Bandung, 2007, hlm 49.

mekanisme suatu sistem, implementasi bukan aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.²⁰

b. Menurut Hanifah dalam bukunya yang berjudul implementasi kebijakan dan politik mengemukakan pendapatnya bahwa, implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan kegiatan menjadi tindakan kebijakan dari politik ke dalam administrasi. Pengembangan suatu kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program.²¹

c. Selain itu, Guntur Setiawan dalam bukunya yang berjudul implementasi dalam birokrasi pembangunan mengemukakan pendapatnya bahwa, implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.²²

Implementasi yang merupakan terjemahan dari kata "*implementation*", berasal dari kata kerja "*to implement*", kata *to implement* berasal dari bahasa latin "*implementatum*" dari asal kata "*impere*" dimaksudkan "*to fill up*", "*to fill in*" yang artinya mengisi penuh, melengkapi, sedangkan "*plere*" maksudnya "*to fill*", yaitu mengisi. Selanjutnya kata "*to implement*" dimaksudkan sebagai:

1. *to carry into effect, to fulfill, accomplish*. Dimana di dalam definisi tersebut dapat dimaksudkan untuk membawa ke suatu hasil (akibat), melengkapi dan menyelesaikan.
2. *to provide with the means for carrying out into effect or fulfilling, to gift practical effect to*. Di dalam definisi kedua ini, *to implement* dimaksudkan sebagai penyediaan sarana (alat) untuk melaksanakan sesuatu, sehingga nantinya dapat memberikan hasil yang bersifat praktis terhadap sesuatu.

²⁰ Usman, Norman, **Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum**, CV Sinar Baru, Bandung, 2002, hlm 70.

²¹ Harsono, Hanifah, **Implementasi Kebijakan Dan Politik**, Grafindo Jaya, Jakarta, 2002, hlm 67.

²² Guntur Setiawan, **Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan**, Balai Pustaka, Jakarta, 2004, hlm 39.

3. *to provide or equip with implement*. Selanjutnya, di dalam definisi ketiga ini, *to implement* dimaksudkan menyediakan atau melengkapi dengan alat.²³

Jadi secara etimologis implementasi itu dapat dimaksudkan sebagai suatu aktivitas yang berkaitan dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana (alat) untuk memperoleh hasil. Apabila pengertian implementasi diatas dirangkaikan dengan kebijakan publik, maka kata implementasi kebijakan publik dapat diartikan sebagai aktivitas penyelesaian atau pelaksanaan suatu kebijakan publik yang telah ditetapkan/disetujui dengan penggunaan sarana (alat) untuk mencapai tujuan kebijakan. Dengan demikian, dalam proses kebijakan publik, implementasi kebijakan merupakan tahapan yang bersifat praktis dan dibedakan dari formulasi kebijakan yang dapat dipandang sebagai tahapan yang bersifat teoritis.²⁴

Dalam tataran praktis, implementasi adalah proses pelaksanaan keputusan dasar. Proses tersebut terdiri atas beberapa tahapan yakni:

1. Tahapan pengesahan peraturan perundangan atau dapat juga berbentuk suatu kebijakan.
2. Pelaksanaan keputusan oleh instansi pelaksana.
3. Kesiadaan kelompok sasaran untuk menjalankan keputusan.
4. Dampak nyata keputusan baik yang dikehendaki maupun tidak.
5. Dampak keputusan sebagaimana yang diharapkan instansi pelaksana.
6. Upaya perbaikan atas kebijakan atau peraturan perundangan.

Sedangkan untuk proses persiapan implementasi setidaknya menyangkut beberapa hal penting yakni:

1. Penyiapan sumber daya, unit dan metode.
2. Penerjemahan kebijakan menjadi rencana dan arahan yang dapat diterima dan dijalankan.

²³ Tachjan, **Implementasi Kebijakan Publik**, Truen RTH, Bandung, 2006, hlm 23.

²⁴ *Ibid*, hlm 24.

3. Penyediaan layanan, pembayaran dan hal lain secara rutin.²⁵
Ada empat faktor yang mempengaruhi kinerja implementasi, yaitu :

1. Kondisi lingkungan (*environmental conditions*)
2. Hubungan antar organisasi (*inter – organizational relationship*)
3. Sumberdaya (*resources*)
4. Karakter institusi implementor (*characteristic implementing agencies*).²⁶

Sebagai sebuah hasil, maka implementasi menyangkut tindakan seberapa jauh arah yang telah diprogramkan itu benar-benar memuaskan.²⁷

Dari pengertian tersebut dapat dijelaskan bahwa implementasi tercipta dari hasil perencanaan yang telah diprogramkan sebelumnya, lalu implementasi akan berperan sebagai evaluasi terkait seberapa tepat sasaran serta memuaskannya suatu program yang telah direncanakan serta dijalankan tersebut. Selanjutnya, terdapat beberapa faktor yang dapat menentukan berhasil atau tidaknya suatu proses implementasi. Faktor tersebut adalah berasal dari :

1. Kualitas kebijakan itu sendiri
2. Kecukupan input kebijakan (terutama anggaran)
3. Ketepatan instrumen yang dipakai untuk mencapai tujuan kebijakan (pelayanan, subsidi, hibah, dan lainnya)
4. Kapasitas implementor (struktur organisasi, dukungan SDM, koordinasi, pengawasan, dan sebagainya)
5. Karakteristik dan dukungan kelompok sasaran (apakah kelompok sasaran adalah individu atau kelompok, laki-laki atau perempuan, terdidik atau tidak)

²⁵ *Ibid.*, hlm 15.

²⁶ Harlan Evan Kaporu, **Implementasi Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum**, Jurnal Nominal, Volume III, Nomor 1, Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Nusa Cendana, NTT, 2014, hlm 105.

²⁷ Mhd. Taufik dan Isril, **Implementasi Peraturan Daerah Badan Permusyawaratan Desa**, Jurnal Kebijakan Publik, Volume 4, Nomor 2, FISIP Universitas Riau, Pekanbaru, 2013, hlm 136.

6. Kondisi lingkungan geografi, sosial, ekonomi, dan politik dimana implementasi tersebut dilakukan.²⁸

Selain itu, implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan.²⁹ Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi pada hakikatnya juga merupakan upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah program dilaksanakan.

B. Tinjauan Umum Mengenai Wewenang

Kata kewenangan berasal dari kata dasar *wenang* yang berarti sebagai hal yang berwenang, dimana mempunyai hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Kewenangan yang biasanya terdiri dari beberapa wewenang adalah kekuasaan terhadap segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan.³⁰ Sedangkan kewenangan pemerintahan adalah kekuasaan badan dan/atau pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik.³¹

Kewenangan yang dimiliki oleh organ pemerintahan atau suatu institusi dalam melakukan perbuatan nyata (*riil*), dapat mengadakan pengaturan atau mengeluarkan keputusan tetapi harus selalu dilandasi oleh kewenangan. Baik wewenang yang diperoleh dari konstitusi secara atribusi, delegasi, maupun mandat. Suatu atribusi menunjuk pada kewenangan yang asli atas dasar konstitusi, yaitu Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 maupun undang-undang. Lain hal dengan kewenangan delegasi, harus dilandaskan dengan suatu pelimpahan wewenang kepada organ pemerintahan yang lain. Tetapi pada mandat terjadi pelimpahan wewenang yang tidak

²⁸ Erwan Agus Purwanto, **Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia**, Gava Media, Yogyakarta, 2012, hlm 86.

²⁹ Mulyadi, **Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik : Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik**, Alfabeta CV, Bandung, 2015, hlm 12.

³⁰ Prajudi Atmosudirdjo, **Hukum Administrasi Negara**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm 78.

³¹ **Undang Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014**, *op.cit.* Pasal 1 Angka 6.

disertai dengan peralihan tanggung jawab dan tanggung gugat. Jadi pihak yang diberi mandat tetap harus bertindak atas nama pemberi mandat atau dengan kata lain pertanggungjawabannya masih ada pada pemberi mandat. Sehingga dalam hal pemberian mandat, pejabat yang diberi mandat menunjuk pejabat lain untuk bertindak atas nama pemberi mandat yang biasa disebut mandator.

Pemerintah dalam menggunakan wewenang publik wajib mengikuti aturan-aturan hukum administrasi negara yang telah diatur di dalam undang-undang. Hal tersebut ditujukan agar supaya di dalam pelaksanaannya tidak terjadi penyalahgunaan wewenang. Keputusan-keputusan terkait dengan wewenang tersebut terikat pada tiga asas hukum, yaitu:

- a. Asas yurisdiksi (*rechtmatigheid*), yang berarti keputusan pemerintahan maupun administratif tidak boleh melanggar hukum (*onrechtmatige overheidsdaad*).
- b. Asas legalitas (*wetmatigheid*), artinya keputusan harus diambil berdasarkan suatu ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang.
- c. Asas diskresi (*discrete, freies ermessen*), artinya pejabat penguasa tidak boleh menolak mengambil keputusan dengan alasan "tidak ada pengaturannya".³²

Dalam melaksanakan tindakan berdasarkan kewenangan, pemerintah atau aparatur negara selalu melihat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang mendasarinya, baik menyangkut kewenangan, materi, prosedur, maupun wujud tindakannya. Penggunaan kewenangan yang dilakukan oleh pemerintah tidak hanya untuk mengatur, tetapi juga untuk menetapkan. Dalam hal penetapannya baik yang ditujukan untuk individu, kewenangan pemerintah harus dilaksanakan berdasarkan hukum yang ada dan jelas sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Salah satu penetapan yang banyak dikeluarkan pemerintah adalah terkait dengan perizinan atau izin.

³² *Ibid.*, hlm 84.

C. Tinjauan Umum Mengenai Perizinan

Pengertian izin menurut Mr. N.M Spelt dan Prof. M. J.B.J.M ten Berge, izin merupakan suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan larangan perundang-undangan³³, inilah pengertian dari izin dalam arti sempit. Jadi dapat dikatakan dalam izin tersebut dapat dipahami bahwa suatu pihak tidak dapat melakukan sesuatu kecuali diizinkan. Sehingga untuk dapat dikatakan izin harus dengan adanya keputusan yang konstitutif dari aparat yang telah berwenang dalam menerbitkan izin tersebut. Pengertian lain yang berkaitan dengan izin dari E. Utrecht yang mengartikan izin adalah bila pembuat peraturan umumnya tidak melarang suatu perbuatan, tetapi masih juga memperkenankannya asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hal konkret, keputusan administrasi negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin.³⁴

Ketentuan tentang perizinan ini mempunyai fungsi mengatur dan menertibkan. Dalam fungsi mengaturnya yaitu dimaksudkan agar izin atau setiap izin tempat-tempat usaha, bangunan dan bentuk kegiatan masyarakat lainnya tidak bertentangan satu sama lain, sehingga terciptanya ketertiban dalam segi kehidupan bermasyarakat. Fungsi mengatur yang dimaksudkan bahwa perizinan yang ada dapat dilaksanakan sesuai dengan peruntukannya izin digunakan, sehingga tidak terdapat penyalahgunaan izin yang telah diberikan dari organ pemerintah, maka dengan kata lain fungsi pengaturan ini dapat disebut juga sebagai fungsi yang dimiliki oleh pemerintah. Adapun tujuan dari perizinan yang secara umum disebutkan sebagai berikut :

- a. *Keinginan mengarahkan (mengendalikan) aktivitas-aktivitas tertentu.*
- b. *Mencegah bahaya bagi lingkungan.*
- c. *Keinginan melindungi objek-objek tertentu.*

³³ Y. Sri Pudyatmoko, **Perizinan Problem dan Upaya Pembetulan**, Grasindo, Yogyakarta, 2009, hlm 7.

³⁴ Andrian Sutedi, **Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik**, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 167.

d. *Pengarahan, dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas, dimana pengurus harus memenuhi syarat tertentu.*³⁵

D. Tinjauan Umum Mengenai Pangan

Pangan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam UUD NRI Tahun 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Oleh sebab itu, maka negara berkewajiban untuk mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional maupun daerah hingga perseorangan secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sepanjang waktu dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal. Negara memiliki kewajiban di dalam penyediaan pangan yang cukup, baik dari segi kuantitas dan/atau jumlah maupun dari segi kualitas dan/atau mutunya. Sehingga nantinya kebutuhan akan pangan, telah diberikan jaminan keamanan, keberagaman jenis pangan, bergizinya kandungan pangan, meratanya pangan, serta terkait keterjangkauannya pangan. Selain itu penyediaan pangan tersebut dilaksanakan dengan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Definisi pangan sendiri adalah :

*"Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman."*³⁶

Pangan merupakan sumber energi bagi tubuh maka dari itu pangan yang dikonsumsi harus terjamin serta terjaga kualitasnya. Hal tersebut bertujuan agar gizi yang terkandung di dalamnya dapat memberi manfaat

³⁵ Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, **Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik**, Nuansa Cendekia, Bandung, 2009, hlm. 218.

³⁶ Pasal 1 Angka 1 **Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan**.

terhadap tubuh secara maksimal, sehingga tidak memberikan dampak negatif dalam tubuh. Pangan yang aman merupakan pangan yang terbebas dari cemaran biologis, fisik maupun kimia yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan fisik maupun psikologis dari manusia. Hal tersebut sejalan dengan pengaturan yang telah tercantum di dalam Undang-Undang Pangan yang menyatakan sebagai berikut :

*"Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi."*³⁷

Penyelenggaraan pangan sendiri diawali dengan kegiatan perencanaan, kemudian baru dilanjutkan dengan pelaksanaan. Di dalam kegiatan perencanaan terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan. Hal-hal tersebut diantaranya adalah :

"Perencanaan pangan harus memperhatikan :

- a. pertumbuhan dan sebaran penduduk;*
- b. kebutuhan konsumsi Pangan dan Gizi;*
- c. daya dukung sumber daya alam, teknologi, dan kelestarian lingkungan;*
- d. pengembangan sumber daya manusia dalam Penyelenggaraan Pangan;*
- e. kebutuhan sarana dan prasarana Penyelenggaraan Pangan;*
- f. potensi Pangan dan budaya lokal;*
- g. rencana tata ruang wilayah; dan*
- h. rencana pembangunan nasional dan daerah."*³⁸

Begitu kompleksnya penyelenggaraan pangan sehingga hal-hal tersebut di atas harus benar-benar diperhatikan di dalam perencanaan penyelenggaraan pangan. Hal ini dikarenakan kebutuhan pangan tidak hanya berdiri sendiri sebagai suatu kesatuan kebutuhan yang paten dan tidak berubah-ubah sepanjang waktu melainkan kebutuhan pangan dapat berubah-ubah setiap waktu atau bersifat dinamis serta berkaitan langsung dengan kondisi serta realita yang ada di masyarakat. Pemerintah sebagai wakil negara tidak bisa melakukan perencanaan penyelenggaraan pangan sendiri, sehingga

³⁷ Ibid., Pasal 1 Angka 5

³⁸ Ibid., Pasal 7

membutuhkan peran serta masyarakat di dalam perencanaan penyelenggaraan pangan. Nantinya, pemerintah bersama masyarakat akan membentuk suatu kesatuan yang bersinergi dan terpadu di dalam merencanakan penyelenggaraan pangan di negara.

E. Tinjauan Umum Mengenai Industri Rumah Tangga

Industri adalah bagian dari proses produksi yang tidak mengambil bahan langsung dari alam, tetapi barang tersebut diolah dahulu sehingga menjadi barang yang bernilai bagi masyarakat. Industri juga dapat diartikan sebagai kerajinan, usaha produk barang, dan ataupun perusahaan. Usaha industri adalah suatu unit (kesatuan) usaha yang melakukan kegiatan ekonomi, bertujuan menghasilkan barang dan jasa, terletak pada suatu bangunan atau lokasi tertentu, dan mempunyai catatan administrasi tersendiri mengenai produksi dan struktur biaya serta ada seorang atau lebih yang bertanggung jawab atas usaha tersebut.³⁹ Sedangkan yang dimaksud sebagai rumah tangga adalah suatu kelompok yang terdiri dari satu atau lebih orang yang tinggal bersama-sama di sebuah tempat tinggal dan juga berbagi makanan atau akomodasi hidup, dan bisa terdiri dari satu keluarga atau sekelompok orang. Istilah rumah tangga bisa juga didefinisikan sebagai sesuatu yang berkenaan dengan urusan kehidupan di rumah. Maka jika digabungkan industri rumah tangga adalah rumah usaha produk barang atau juga perusahaan kecil. Dikatakan sebagai perusahaan kecil karena jenis kegiatan ekonomi ini dipusatkan di rumah.⁴⁰

Industri rumah tangga pada umumnya adalah unit-unit usaha yang sifatnya lebih tradisional, dalam arti menerapkan sistem organisasi dan manajemen yang baik seperti lazimnya dalam perusahaan modern, tidak ada

³⁹ Lie Liana, **Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil Sebagai Sarana Memperkokoh Struktur Perekonomian Nasional**, Jurnal Bisnis dan Ekonomi, Volume 15, Nomor 2, Fakultas Ekonomi Universitas Stikubank Semarang, Semarang, 2008, hlm 100.

⁴⁰ Saifuddin Zuhri, **Analisis Pengembangan Usaha Kecil Home Industri Sangkar Ayam Dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan**, Jurnal Manajemen dan Akuntansi, Volume 2, Nomor 3, Fakultas Ekonomi Universitas Islam Darul Ulum Lamongan, Lamongan, 2013, hlm 48.

pembagian kerja dan sistem pembukuan yang jelas.⁴¹ Selain itu, industri rumah tangga disebut pula sebagai suatu kegiatan keluarga, yaitu sebagai unit-unit konsumtif dan produktif yang terdiri dari paling sedikit dua anggota rumah tangga yang sama, sama-sama menanggung pekerjaan, makanan dan tempat berlindung.⁴² Industri rumah tangga merupakan suatu sistem produksi yang menghasilkan nilai tambah dan pelaksanaannya dilakukan di lokasi rumah perorangan, atau dengan kata lain pelaksanaan kegiatan industri tidak dilakukan di suatu pabrik. Dari skala usaha, industri rumahan termasuk usaha mikro. Umumnya industri rumahan tergolong sektor informal yang memproduksi secara unik, terkait dengan kearifan lokal, sumber daya setempat dan mengedepankan buatan tangan. Industri rumah tangga bergerak dalam skala kecil, dari tenaga kerja yang bukan professional, serta modal yang kecil. Lebih lanjut lagi, Badan Pusat Statistik menyatakan bahwa yang dimaksud sebagai industri rumah tangga adalah suatu unit (kesatuan) usaha yang melakukan kegiatan ekonomi, bertujuan menghasilkan barang atau jasa, terletak pada suatu bangunan atau lokasi tertentu, dan mempunyai catatan administrasi tersendiri mengenai produksi dan struktur biaya serta ada seorang atau lebih yang bertanggung jawab atas usaha tersebut, dan dengan jumlah tenaga kerja 1 (satu) sampai dengan 4 (orang).⁴³

Definisi terkait Industri Rumah Tangga Pangan yang selanjutnya disebut sebagai IRTP sebenarnya telah tercantum di dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa :

*"Industri Rumah Tangga Pangan yang selanjutnya disingkat IRTP adalah perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga semi otomatis."*⁴⁴

⁴¹ Tulus T.H Tambunan. **Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia (Beberapa Isu Penting)**, Salemba Empat, Jakarta, 2002, hlm 166.

⁴² Kimbal.R.W, **Modal Sosial dan Ekonomi Industri Kecil : Sebuah Studi Kualitatif**, Penerbit Depublis, Yogyakarta, 2015, hlm 27.

⁴³ Badan Pusat Statistik, 2020, **Industri Besar dan Sedang** (online), <https://www.bps.go.id/subject/9/industri-besar-dan-sedang.html>, (24 September 2020).

⁴⁴ Pasal 1 Angka 3 **Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga**.

Berdasarkan definisi tersebut di atas maka dapat dipahami bahwa pelaku usaha industri rumah tangga pangan adalah keluarga itu sendiri dengan mengajak orang di sekitarnya sebagai karyawan, dimana pengerjaan industri tersebut masih dalam tahap manual sampai dengan semi otomatis saja. Meskipun dalam skala mikro, namun kegiatan ekonomi ini secara tidak langsung membuka lapangan pekerjaan untuk sanak saudara ataupun tetangganya. Dengan begitu, usaha mikro ini membantu program pemerintah dalam mengurangi pengangguran, otomatis jumlah penduduk miskin pun akan berangsur menurun.

Jenis-jenis usaha industri rumah tangga pangan adalah macam-macam industri rumahan yang menghasilkan produk olahan makanan dan minuman atau biasa disebut sebagai produsen pangan (makanan dan minuman) yang diproduksi oleh industri rumah tangga, yaitu perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha di tempat rumah tinggal dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga semi otomatis, dan dipasarkan secara lokal sampai dengan nasional. Deskripsi terkait jenis pangan IRT yang diizinkan untuk memperoleh SPP-IRT dapat dilihat di dalam Lampiran II Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga. Dimana di dalam lampiran tersebut telah diterangkan secara lengkap dan detail terkait jenis pangan apa saja yang dapat memperoleh SPP-IRT. Jenis pangan tersebut diantaranya adalah :

1. Hasil Olahan Daging Kering
2. Hasil Olahan Ikan Kering
3. Hasil Olahan Unggas Kering
4. Hasil Olahan Sayur
5. Hasil Olahan Kelapa
6. Tepung dan Hasil Olahannya
7. Minyak dan Lemak
8. Selai, Jeli dan Sejenisnya
9. Gula, Kembang Gula, dan Madu

10. Kopi dan Teh Kering
11. Bumbu
12. Rempah-Rempah
13. Minuman Serbuk
14. Hasil Olahan Buah
15. Hasil Olahan Biji-Bijian, Kacang-Kacangan dan Umbi.⁴⁵

Sehingga berdasarkan pemaparan tersebut di atas dapat ditemukan suatu kriteria tertentu yang dimiliki oleh industri rumah tangga pangan, diantaranya adalah :

- a. Kegiatan industri dilakukan di rumah tangga, bukan di pabrik atau tempat khusus industri.
- b. Tenaga kerja hanya sekitar 1 (satu) sampai dengan 4 (orang) saja.
- c. Peralatan pengolahan industri pangan yang digunakan mulai dari manual hingga peralatan semi otomatis.

F. Tinjauan Umum Mengenai Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)

Salah satu hak asasi yang dimiliki oleh setiap manusia adalah terkait pemenuhan pangan yang memiliki jaminan mutu serta keamanannya. Ketentuan tersebut berlaku secara universal, yang artinya tidak terkecuali terhadap hasil produk pangan olahan yang dihasilkan oleh IRTP. Begitu pentingnya keamanan mutu serta kualitas di dalam hasil produk pangan olahan akhirnya melahirkan suatu pengaturan yang menyatakan diwajibkannya kepemilikan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga atau biasa disebut dengan SPP-IRT bagi seluruh pelaku usaha IRTP dalam rangka produksi serta pengedaran pangan. Terkait kewenangan penerbitan SPP-IRT, hal tersebut telah tercantum di dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 yang

⁴⁵ *Ibid.*, Lampiran II Tentang Deskripsi Jenis Pangan IRTP yang diizinkan untuk memperoleh SPP-IRT.

menyatakan bahwa kewenangan penerbitan SPP-IRT berada di tangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota melalui Bupati/Walikota. Lebih lanjut, di dalam lampiran tersebut diterangkan bahwa pemerintah daerah Kabupaten/Kota dapat melaksanakan :

1. Penerbitan izin produksi makanan dan minuman pada industri rumah tangga, serta
2. Pengawasan *post-market* produk makanan dan minuman industri rumah tangga.

Namun meskipun kewenangan penerbitan SPP-IRT berada di tangan Bupati/Walikota sebagai wakil pemerintah daerah Kabupaten/Kota, dalam pelaksanaan penerbitan SPP-IRT harus tetap memperhatikan dan mengacu kepada Pedoman Pemberian SPP-IRT yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Di dalam usaha IRTP, salah satu hal terpenting dalam melakukan kegiatan produksi jenis pangan olahan IRTP baik makanan maupun minuman adalah izin produksi. Hal tersebut dikarenakan seluruh produk makanan dan minuman yang diedarkan secara luas harus memiliki izin produksi dengan tujuan agar supaya terdapat perlindungan bagi konsumen. Ketentuan tersebut pun tidak terkecuali untuk hasil produksi pangan IRTP. Sehingga setiap produk pangan produksi IRTP harus memiliki izin produksi, yang dalam hal ini biasa disebut dengan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga atau SPP-IRT. Definisi terkait SPP-IRT sendiri adalah :

*"Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat SPP-IRT adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh Bupati/Walikota terhadap Pangan Produksi IRTP di wilayah kerjanya yang telah memenuhi persyaratan pemberian SPP-IRT dalam rangka peredaran Pangan Produksi IRTP."*⁴⁶

Pelaku usaha IRTP dalam mengajukan permohonan penerbitan SPP-IRT harus memenuhi beberapa syarat. Syarat tersebut diantaranya adalah telah mengikuti penyuluhan keamanan pangan, dimana dalam hal ini keikutsertaannya dibuktikan dengan dimilikinya Sertifikat Penyuluhan

⁴⁶ *Ibid*, **Pasal 1 Angka 13.**

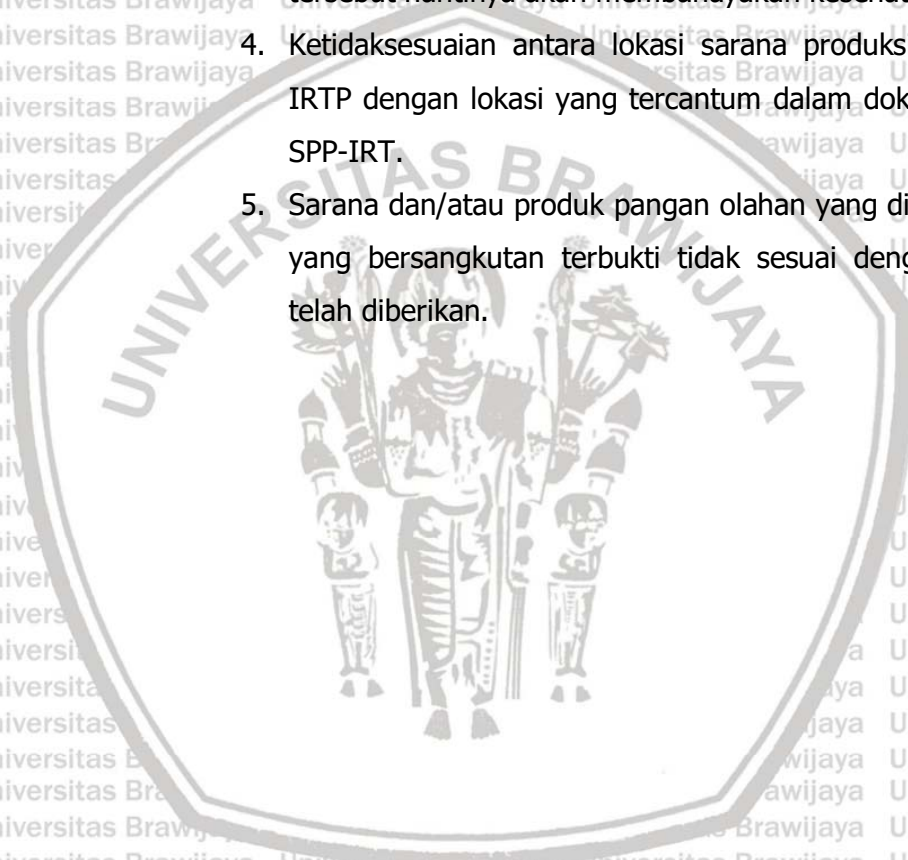
Keamanan Pangan yang selanjutnya disebut dengan SPKP. Penyuluhan keamanan pangan sebagai syarat utama harus dapat dipenuhi oleh pelaku usaha IRTP yang sedang mengajukan permohonan penerbitan SPP-IRT. Hal tersebut dikarenakan syarat berikutnya, yakni pemeriksaan sarana produksi pangan IRTP hanya dapat dilaksanakan apabila pemilik atau penanggungjawab IRTP telah memiliki SPKP tersebut. Dimana nantinya yang memiliki wewenang untuk melakukan pemeriksaan sarana produksi pangan IRTP adalah Tenaga Pengawas Pangan Kabupaten/Kota atau DFI (*District Food Inspector*) yang dalam hal ini adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memiliki Sertifikat kompetensi Pengawas Pangan Kabupaten/Kota. Persyaratan selanjutnya adalah produk hasil pangan olahan IRTP harus memiliki label pangan. Label pangan di dalam produk hasil pangan olahan IRTP berisi keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan atau dapat juga kombinasi keduanya. Yang kemudian label pangan tersebut harus disertakan pada pangan olahan IRTP, baik dengan cara memasukkannya ke dalam kemasan, menempelkannya pada kemasan, ataupun label pangan tersebut merupakan bagian dari kemasan pangan olahan IRTP. Masa berlaku SPP-IRT adalah paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak diterbitkan. Namun masa berlaku tersebut dapat diperpanjang oleh pemilik/ penanggungjawab IRTP dengan mengajukan permohonan perpanjangan SPP-IRT paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa berlaku SPP-IRT berakhir.

SPP-IRT sebagai bukti konkrit atas diberikannya izin produksi bagi pelaku usaha IRTP dapat juga mengalami pencabutan. Dengan pencabutan SPP-IRT, berarti pangan produksi IRTP dilarang untuk diedarkan. Hal-hal yang mendasari dilakukannya pencabutan atas SPP-IRT diantaranya adalah :

1. Telah terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh pemilik atau penanggungjawab IRTP. Pelanggaran yang dilakukan tersebut merupakan pelanggaran peraturan maupun ketentuan yang berada di dalam bidang pangan.
2. Terjadinya keracunan pangan yang disebabkan oleh pangan produksi IRTP. Hal tersebut harus dibuktikan dengan hasil

pemeriksaan yang menyatakan bahwa penyebab keracunan pangan tersebut adalah pangan olahan produksi IRTP yang bersangkutan.

3. Terdapat kandungan bahan berbahaya atau bahan kimia obat yang tidak diperbolehkan di dalam kegiatan produksi pangan olahan IRTP. Dimana kandungan bahan berbahaya atau kimia obat tersebut nantinya akan membahayakan kesehatan manusia.
4. Ketidakesuaian antara lokasi sarana produksi pangan produksi IRTP dengan lokasi yang tercantum dalam dokumen pendaftaran SPP-IRT.
5. Sarana dan/atau produk pangan olahan yang dihasilkan oleh IRTP yang bersangkutan terbukti tidak sesuai dengan SPP-IRT yang telah diberikan.



BAB III**HASIL DAN PEMBAHASAN****A. Gambaran Umum Kota Malang****1. Keadaan Geografis Kota Malang**

Kota Malang yang terletak pada ketinggian antara 440 – 667 meter diatas permukaan air laut, merupakan salah satu kota tujuan wisata di Jawa Timur karena potensi alam dan iklim yang dimiliki. Letaknya yang berada di tengah-tengah wilayah Kabupaten Malang secara astronomis terletak $112,06^{\circ}$ – $112,07^{\circ}$ Bujur Timur dan $7,06^{\circ}$ – $8,02^{\circ}$ Lintang Selatan, dengan batas wilayah sebagai berikut⁴⁷ :

- Sebelah Utara : Kecamatan Singosari dan Kec. Karangploso Kabupaten Malang
- Sebelah Timur : Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang
- Sebelah Selatan : Kecamatan Tajinan dan Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang
- Sebelah Barat : Kecamatan Wagir dan Kecamatan Dau Kabupaten Malang

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Malang, Kota Malang memiliki luas wilayah 110,06 km² yang terbagi menjadi 5 kecamatan, dan 57 kelurahan.116 Lima kecamatan tersebut terdiri dari⁴⁸ :

- a) Kecamatan Blimbing memiliki luas wilayah 17,77 km² dan memiliki 11 kelurahan.
- b) Kecamatan Klojen memiliki luas wilayah 8,83 km² dan memiliki 11 kelurahan.

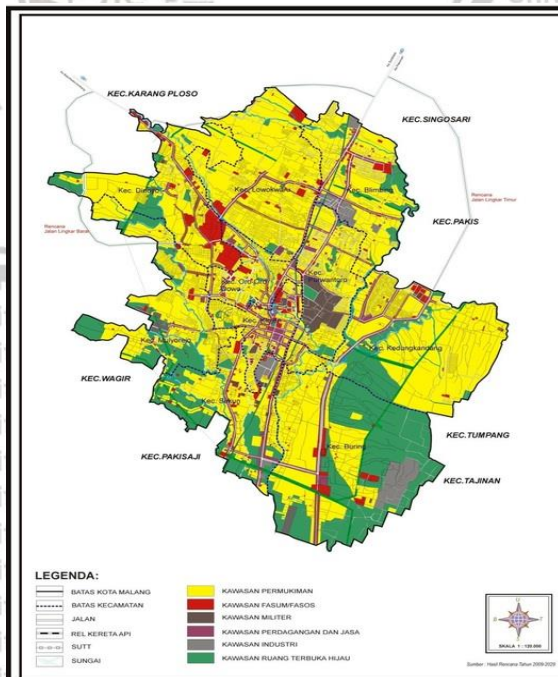
⁴⁷ Pemerintah Kota Malang, <https://malangkota.go.id/sekilas-malang/geografis/>, Diakses pada tanggal 3 Januari 2021.

⁴⁸ Badan Pusat Statistik Kota Malang, <https://malangkota.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/425>, Diakses 3 Januari 2021.

- c) Kecamatan Kedungkandang memiliki luas wilayah 39,89 km² dan memiliki 12 kelurahan.
- d) Kecamatan Lowokwaru memiliki luas wilayah 22,60 km² dan memiliki 12 kelurahan.
- e) Kecamatan Sukun memiliki luas wilayah 20,87 km² dan memiliki 11 kelurahan.

Pembagian wilayah yang terbagi menjadi lima kecamatan memiliki perbedaan pada tingkat perekonomian. Wilayah yang memiliki kawasan strategis pertumbuhan perekonomian yang tinggi salah satunya berada di Kecamatan Lowokwaru. Hal ini dikarenakan pada wilayah tersebut terdapat tempat-tempat yang menjadi pusat aktivitas seperti universitas, mall, pasar, dan tempat rekreasi lainnya. Selain itu, letak Kecamatan Lowokwaru juga dijadikan jalan utama untuk menuju Kota Batu. Maka kerap kali terjadi kemacetan pada wilayah tersebut baik dikarenakan kendaraan yang melewati Kota Malang menuju Kota Batu maupun kendaraan yang singgah untuk beristirahat.

Gambar 3.1 Peta Rencana Tata Guna Lahan Kota Malang



Sumber : Data Sekunder, Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan (Barenlitbang) Kota Malang.

2. Keadaan Topografi Kota Malang

Topografi Kota Malang mirip dengan fisik geografi dataran tinggi di Kabupaten Malang. Kota Malang dilalui oleh sebuah sungai besar, yaitu

Sungai Brantas yang merupakan sungai terpanjang kedua di Pulau Jawa.

Kota Malang terletak di ketinggian 440—667 meter di atas permukaan air

laut. Puncak tertinggi Kota Malang terletak di Citra *Garden City* Malang

yang merupakan sebuah kota mandiri hasil kembangan Ciputra *Group*,

sedangkan wilayah terendah yang dimiliki Kota Malang adalah kawasan

Dieng. Selain itu, Kota Malang merupakan kota yang dikelilingi oleh

beberapa pegunungan, diantaranya adalah :

- Sebelah utara terdapat Gunung Arjuno
- Sebelah timur terdapat Gunung Semeru
- Sebelah barat terdapat Gunung Panderman Gunung Kawi dan Gunung Kelud

3. Keadaan Demografi Kota Malang

Secara Administratif Kota Malang terbagi menjadi 5 kecamatan yang

terdiri dari 57 kelurahan dengan jumlah keseluruhan sebagai berikut :

Tabel 3.1 Data Jumlah Penduduk Kota Malang

Kecamatan	2019			2020		
	Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin (Jiwa)			Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin (Jiwa)		
	L	P	Total	L	P	Total
Kedungkandang	96.684	97.657	194.341	97.650	98.648	196.298
Sukun	97.194	98.465	195.659	97813	99104	196.917
Klojen	48.571	53.447	102.018	48.277	53.133	101.410

Blimbing	89.570	91.235	180.805	89.871	91.555	181.426
Lowokwaru	97.397	100.462	197.859	97.872	100.967	198.839
Total Keseluruhan	429.416	441.266	870.682	431.483	443.407	874.890

Sumber : Data Sekunder, Badan Pusat Statistik Kota Malang.

B. Gambaran Umum Dinas Tenaga Kerja dan PMPTSP Kota Malang

1. Sejarah Pelayanan

- Tahun 1998 – 2001 Unit Pelayanan Masyarakat Terpadu (UPMT) Jl. Ahmad Yani I Kota Malang
- Tahun 2001 – 2009 Dinas Perijinan Kota Malang Jl. Ahmad Yani I Kota Malang : Menyelenggarakan 14 Jenis Perizinan
- Tahun 2009 – 2016 Dasar Pembentukan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) : Menyelenggarakan 14 Perizinan dan 3 Non Perizinan
- Tahun 2017 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) : Menyelenggarakan 47 Jenis Perizinan dan 9 Non Perizinan
- Tahun 2020 – sekarang Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DisnakerPMPTSP) : Menyelenggarakan 109 Jenis Perizinan dan 22 Non Perizinan

2. Profil Singkat

Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang terletak di Perkantoran Terpadu Kota Malang Gedung A, tepatnya di Jalan Mayjend Sungkono, Kelurahan Arjowinangun, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang. Untuk bagian loket pelayanan terletak di Lantai 1, namun untuk bagian sekretariat serta bidang-bidang terletak di Lantai 2 Gedung A Perkantoran Terpadu Kota Malang. Untuk mendukung pembangunan yang dicanangkan oleh Pemerintah Kota Malang, Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang berfokus pada “Terwujudnya Pelayanan Prima

dan Ramah Investasi". Upaya di dalam mewujudkan pelayanan prima tersebut dilaksanakan dalam pemberian pelayanan perizinan atau non perizinan kepada masyarakat yang menjadi pemohon, baik di dalam bidang tenaga kerja, ekonomi, pariwisata, sosial budaya serta pekerjaan umum. Sedangkan ramah investasi diwujudkan dalam bentuk pengembangan iklim penanaman modal yang akan mendorong kemajuan pembangunan di Kota Malang. Dimana bentuk upaya perwujudan tersebut disertai dengan sikap mutu pelayanan yang adil terukur, berkualitas serta akuntabel.

3. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan pada Peraturan Walikota Malang Nomor 67 Tahun 2019, maka Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut⁴⁹:

a) Tugas :

Dinas Tenaga Kerja dan PMPTSP mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja dan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah, serta pelayanan terpadu satu pintu.

b) Fungsi :

1. Perumusan kebijakan di bidang tenaga kerja, penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
2. Pelayanan perizinan dan nonperizinan;
3. Pelaksanaan pelatihan ketenagakerjaan;
4. Pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta dan lembaga penempatan tenaga kerja swasta;
5. Pembinaan bidang ketenagakerjaan, penanaman modal, pelayanan perizinan dan nonperizinan;
6. Pemberian konsultasi produktivitas pada perusahaan kecil;

⁴⁹ Peraturan Walikota Malang Nomor 67 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

7. Pengukuran produktivitas tenaga kerja;
8. Pemberian informasi pasar kerja, penyuluhan dan bimbingan jabatan serta perantaraan kerja dalam pelayanan antar kerja;
9. Koordinasi perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri pra dan purna penempatan;
10. Koordinasi pengawasan tenaga kerja asing;
11. Pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam daerah;
12. Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan di daerah;
13. Penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal;
14. Penyusunan peta potensi investasi;
15. Penyelenggaraan promosi penanaman modal;
16. Fasilitasi kemitraan pelaku usaha kecil, menengah dan besar;
17. Pengendalian pelaksanaan tenaga kerja, penanaman modal, dan perizinan;
18. Pengelolaan data dan informasi tenaga kerja, penanaman modal, dan perizinan terintegrasi;
19. Pencabutan izin atas pelanggaran terhadap perizinan dan nonperizinan yang diterbitkan;
20. Pengembangan sistem informasi dan pengolahan data tenaga kerja, penanaman modal dan perizinan;
21. Pelaksanaan penanganan pengaduan dan informasi tenaga kerja, penanaman modal dan perizinan;
22. Pengawasan dan/atau penindakan pelanggaran terhadap peraturan di bidang tenaga kerja, penanaman modal dan perizinan;
23. Pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional;

24. Pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;

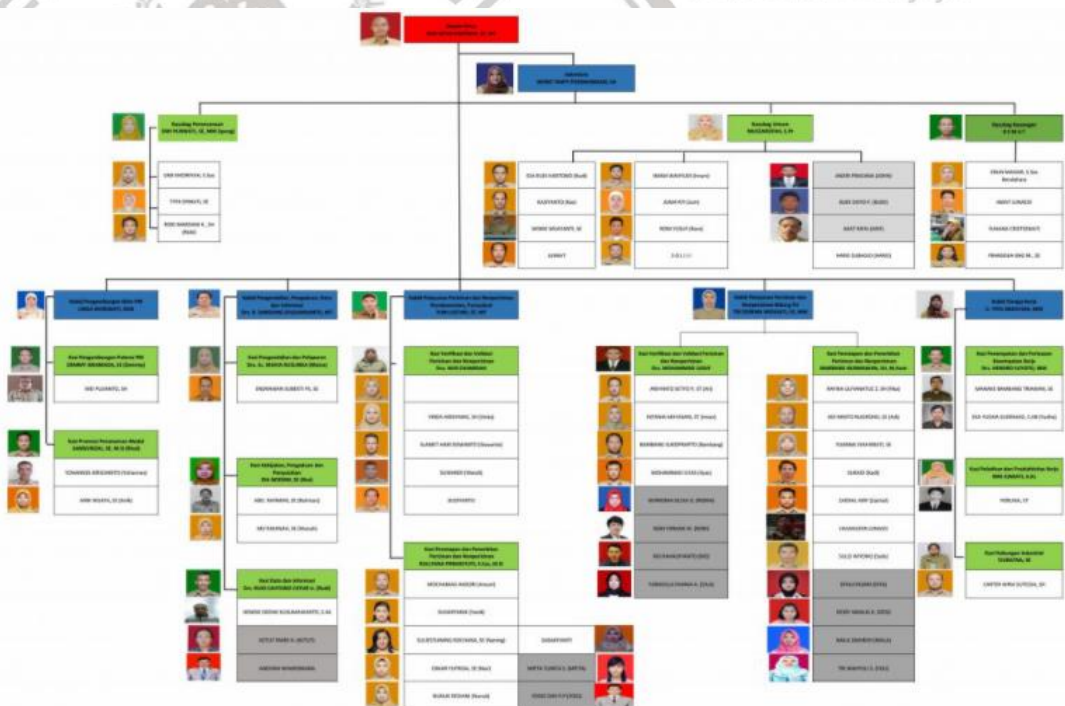
25. Pelaksanaan administrasi di bidang tenaga kerja dan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;

26. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang tenaga kerja dan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;

27. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota di bidang tenaga kerja dan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;

4. Struktur Organisasi

Gambar 3.2 Struktur Organisasi



Sumber : Data Sekunder, Dinas Tenaga Kerja dan PMPTSP Kota Malang

Setiap organ pemerintahan, termasuk dinas di masing-masing daerah memiliki struktur organisasi untuk menggambarkan secara jelas unsur-unsur yang membantu pimpinan dalam menjalankan dinas terkait. Tujuan adanya struktur organisasi adalah untuk memberikan kejelasan dalam

tanggung jawab, menjelaskan kedudukan dan koordinasi masing masing setiap staf, serta pencapaian kinerja dalam organisasi atau perusahaan yang berdasarkan bidangnya masing-masing. Bentuk struktur organisasi pada Dinas Tenaga Kerja dan PMPTSP Kota Malang menggunakan bentuk divisional dengan tujuan agar supaya menciptakan kemudahan dalam pengolahan kinerja yang sudah ditentukan. Berdasarkan gambar struktur organisasi yang telah terlampir di atas maka dapat dideskripsikan bahwa Dinas Tenaga Kerja dan PMPTSP Kota Malang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang dibantu oleh seorang Sekretaris yang memimpin Sekretariat yang terdiri atas Sub bagian, seperti Sub bagian Perencanaan, Sub bagian Keuangan, serta Subbagian Umum dan Kepegawaian. Selain itu, Dinas Tenaga Kerja dan PMPTSP Kota Malang terdiri atas beberapa bidang, seperti Bidang Tenaga Kerja, Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Bidang Pengendalian, Pengaduan, Data dan Informasi, Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Bidang Ekonomi, Pariwisata, Sosial Budaya, serta Pekerjaan Umum. Struktur organisasi seperti tersebut di atas bertujuan agar masing-masing bidang di dalamnya dapat serta mampu untuk melaksanakan fungsinya dengan baik, sehingga kebutuhan pelayanan masyarakat dapat diberikan secara prima.

C. Pembahasan

1. Implementasi Pasal 3 Huruf B Angka 46 Peraturan Walikota Malang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan dari Walikota Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Hampir sebagian besar bentuk kegiatan pada saat ini memerlukan izin dalam pelaksanaannya, termasuk kegiatan usaha. Kegiatan usaha yang memerlukan izin, tidak terbatas pada kegiatan usaha di bidang jasa saja, namun juga kegiatan usaha di bidang produksi barang pun memerlukan izin

sebagai legalitas penyelenggaraan kegiatannya. Dengan kedudukan izin sebagai legalitas di dalam penyelenggaraan kegiatan usaha tersebut, maka tidak berlebihan jika izin dikatakan telah memegang peranan penting di dalam dunia usaha. Perkembangan dunia usaha sangat dipengaruhi oleh izin yang dimiliki oleh para pelaku usaha. Jika pelaku usaha tidak memiliki izin yang jelas menurut hukum, maka kegiatan usaha tersebut akan mengalami beberapa hambatan di dalam pelaksanaannya. Misalnya saja, pada kasus pelaku usaha industri rumah tangga di bidang pangan, jika pelaku usaha tersebut tidak memiliki Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) yang berlaku sebagai izin produksi serta izin edar bagi produk pangan yang dihasilkannya, maka produk pangan yang dihasilkan tidak dapat diedarkan secara luas, selain itu timbul keragu-raguan dari konsumen untuk membeli produk pangan tersebut. Hal ini dikarenakan dengan dimilikinya Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) oleh pelaku industri rumah tangga pangan memberikan penegasan bahwa produk pangan yang dihasilkan telah menjalani pemeriksaan dan dinyatakan layak untuk dikonsumsi.

Perizinan Pangan Industri Rumah Tangga yang dituangkan ke dalam bentuk Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) pada dewasa ini dirasa sangat lumrah untuk dimiliki oleh setiap pelaku usaha industri rumah tangga di bidang pangan agar dapat mencapai tujuannya untuk terus mengembangkan usahanya. Dengan dimilikinya Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT), pelaku usaha industri rumah tangga pangan akan mendapat hak dan kewajiban yang bermanfaat untuk usahanya. Hak yang diperoleh sebagai akibat dari kepemilikan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) misalnya berupa pemberian nomor P-IRT oleh pihak yang berwenang, dimana nomor P-IRT tersebut menegaskan bahwa produk pangan yang dihasilkan telah menjalani pengujian dan memenuhi syarat untuk dikatakan sebagai produk pangan yang layak dikonsumsi oleh masyarakat. Dengan adanya keterangan tersebut pada produk pangan yang akan dijual, maka secara tidak langsung

memberi opini baik bagi para konsumen bahwa produk yang dijual adalah produk yang baik dan telah diuji oleh dinas yang berwenang. Sehingga pelaku usaha dapat mengembangkan kegiatan usaha tersebut karena adanya hak dari izin yang dimiliki.

Pasal 3 huruf B angka 46 Peraturan Walikota Malang Nomor 3 Tahun 2020 menyatakan bahwa Walikota mendelegasikan kewenangan penerbitan SPP-IRT kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan PMPTSP Kota Malang.

Delegasi merupakan salah satu sumber kewenangan. Dengan adanya pendelegasian kewenangan yang berasal dari Walikota kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, dan PMPTSP Kota Malang, maka secara otomatis tanggung jawab serta tanggung gugat yang berkaitan dengan penerbitan SPP-IRT telah beralih kepada Dinas Tenaga Kerja dan PMPTSP Kota Malang. Hal tersebut dikarenakan pada saat terjadi pendelegasian kewenangan, maka dapat diartikan pada saat itu pula terjadi pelimpahan wewenang pemerintahan dari pejabat satu kepada pejabat lainnya. Sehingga tanggung jawab secara yuridis bukan lagi dipegang oleh Walikota Malang sebagai pemberi delegasi, namun beralih kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan PMPTSP Kota Malang sebagai penerima delegasi.

Selanjutnya, untuk mengetahui lebih dalam mengenai implementasi peraturan walikota tersebut, penulis melakukan wawancara dengan pihak Dinas Tenaga Kerja dan PMPTSP Kota Malang guna mendapatkan informasi mendalam terkait mengimplementasikan wewenang tersebut. Kegiatan penggalan data yang pertama kali penulis lakukan adalah terkait pengetahuan pegawai Dinas Tenaga Kerja dan PMPTSP Kota Malang terkait dengan pendelegasian kewenangan pengurusan izin kesehatan dari Walikota kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan PMPTSP Kota Malang. Berdasarkan hasil kuesioner yang dibagikan penulis kepada 69 Pegawai Dinas Tenaga Kerja dan PMPTSP Kota Malang, didapatkan bahwa :

Pengetahuan Pegawai Dinas Tenaga Kerja dan PMPTSP Kota Malang terkait Pendelegasian Wewenang Pengurusan Izin Kesehatan

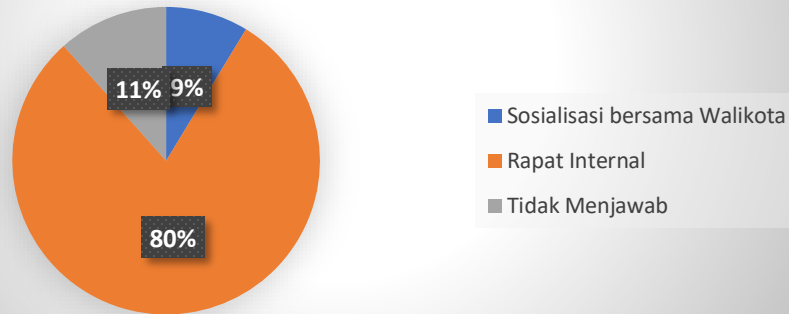


Grafik3.1 Sumber Primer, Dinas Tenaga Kerja dan PMPTSP Kota Malang

Berdasarkan grafik tersebut di atas, dapat diketahui bahwa 54 pegawai mengetahui terkait adanya pendelegasian wewenang pengurusan izin kesehatan yang dilimpahkan oleh Walikota kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan PMPTSP Kota Malang. Namun berdasarkan data tersebut di atas, juga didapatkan hasil bahwa masih terdapat 6 pegawai yang tidak mengetahui terkait adanya pendelegasian wewenang pengurusan izin kesehatan tersebut. Selanjutnya, 9 pegawai memilih untuk tidak menjawab.

Selanjutnya, kuesioner yang dibagikan penulis kepada pegawai Dinas Tenaga Kerja dan PMPTSP Kota Malang memberikan data bahwa lebih dari 50% pegawai Dinas Tenaga Kerja dan PMPTSP Kota Malang mengetahui adanya pendelegasian wewenang pengurusan izin kesehatan tersebut adalah melalui rapat internal yang diadakan Dinas Tenaga Kerja dan PMPTSP Kota Malang. Data tersebut dapat digambarkan dengan grafik sebagai berikut :

Sumber Informasi Pendelegasian Wewenang Pengurusan Izin Kesehatan



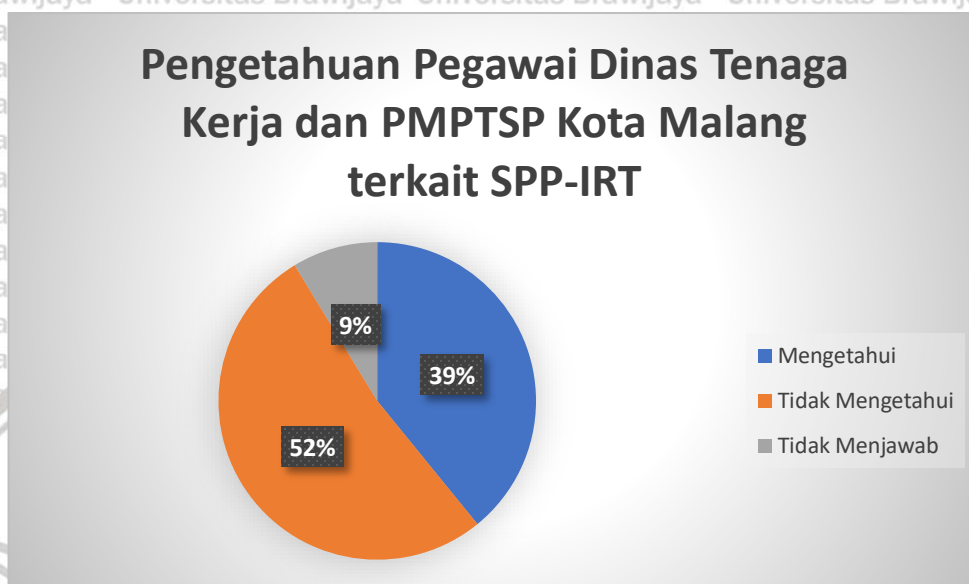
Grafik3.2 Sumber Primer, Dinas Tenaga Kerja dan PMPTSP Kota Malang

Berdasarkan grafik tersebut di atas, maka diketahui bahwa 80% pegawai yakni sejumlah 55 orang mengetahui adanya pendelegasian wewenang pengurusan izin kesehatan melalui rapat internal yang diselenggarakan pasca dikeluarkannya peraturan walikota terkait pendelegasian wewenang tersebut. Selanjutnya, 9% pegawai yakni sejumlah 6 orang menjawab bahwa mengetahui adanya pendelegasian wewenang pengurusan izin kesehatan melalui sosialisasi yang diselenggarakan bersama Walikota. Jumlah persentase ini apabila dibandingkan dengan persentase sebelumnya, yakni melalui rapat internal, dapat dikatakan lebih kecil. Hal ini dikarenakan, yang mengikuti sosialisasi bersama Walikota bukan seluruh pegawai, namun hanya beberapa perwakilan bidang saja.⁵⁰ Selanjutnya, 11% pegawai yakni sejumlah 8 orang memilih untuk tidak menjawab.

Untuk mengetahui serta menganalisis terkait Implementasi Pasal 3 Huruf B Angka 46 Peraturan Walikota Malang No. 3 Tahun 2020 terkait Penerbitan SPP-IRT, maka penulis mengawalinya dengan pencarian data terkait dengan pengetahuan pegawai Dinas Tenaga Kerja dan PMPTSP Kota

⁵⁰ Hasil wawancara dengan Ibu Woro Tanty Poerwandany, SH selaku sekretaris pada Dinas Tenaga Kerja dan PMPTSP Kota Malang.

Malang terkait SPP-IRT. Berdasarkan kuesioner yang dibagikan penulis, didapatkan data sebagai berikut :



Grafik3.3 Sumber Primer, Dinas Tenaga Kerja dan PMPTSP Kota Malang

Berdasarkan grafik tersebut di atas, maka diketahui bahwa 39% pegawai yakni sejumlah 27 orang mengetahui terkait SPP-IRT. Selanjutnya, 52% pegawai yakni sejumlah 36 orang menjawab tidak mengetahui terkait SPP-IRT. Hal tersebut sejalan dengan keterangan yang didapat penulis di lapangan, yang menyatakan bahwa:

*"Hal-hal yang terkait dengan SPP-IRT ini memang rasanya belum diketahui secara menyeluruh oleh pegawai dinas disini. Mungkin bisa dibilang kalau yang tahu dan paham tentang SPP-IRT ini hanya bidang yang mengurus tentang perizinan dan nonperizinan saja, atau juga petugas pelayanan yang bertugas di loket atau desk pelayanan. Tapi secepatnya kami akan melaksanakan sosialisasi internal supaya seluruh pihak di dinas ini paham terkait SPP-IRT."*⁵¹

Selanjutnya, 9% pegawai yakni sejumlah 6 orang memilih untuk tidak menjawab.

Selain itu, berdasarkan wawancara tertanggal 21 Desember 2020 dengan Bapak Mei Pujianto, SH selaku petugas pelayanan desk 12 Dinas Tenaga

⁵¹ Ibid.

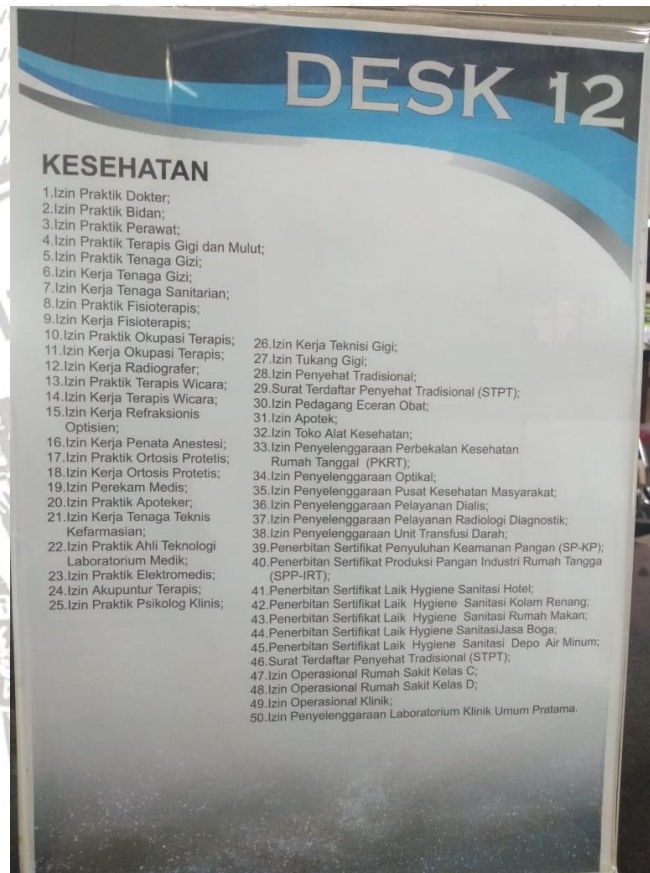
Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang, yang bertugas melayani berbagai macam pengurusan serta penerbitan izin kesehatan, termasuk Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT), maka tata urutan penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) di Kota Malang yaitu⁵² :

1. Pemohon datang langsung ke Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang dan menuju desk pelayanan nomor 12 untuk melakukan pendaftaran. Patut diketahui bahwa desk pelayanan nomor 12 ini dikhususkan hanya untuk melayani berbagai macam jenis izin kesehatan, seperti Surat Izin Praktik dan Surat Izin Kerja Profesi Kesehatan seperti Dokter, Bidan, Perawat, Terapis, Apoteker dan sebagainya. Selain itu, pada desk pelayanan nomor 12 tentunya juga melayani pengurusan penerbitan Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan (SP-KP) dan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SP-IRT).

⁵² Hasil wawancara dengan Bapak Mei Pujiyanto, SH selaku petugas pelayanan izin kesehatan pada Dinas Tenaga Kerja dan PMPTSP Kota Malang.

Desk Pelayanan Nomor 12 Dinas Tenaga Kerja dan PMPTSP Kota Malang

**Gambar 3.3 Desk Pelayanan Nomor 12 Dinas Tenaga Kerja
dan PMPTSP Kota Malang**




**Sumber : Data Primer, Dinas Tenaga Kerja dan PMPTSP Kota
Malang**

2. Pemberian Formulir Permohonan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT).

Formulir ini diberikan oleh Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal, dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang kepada pemohon yang ingin
mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri
Rumah Tangga (SPP-IRT).

Gambar 3.4 Formulir SPP-IRT Pemerintah Kota Malang



PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jl. Mayjen Sungkono, Perkantoran Terpadu Gedung A, Telp. (0341) 751942, Faks. (0341) 754116
<http://disnakerpmpptsp.malangkota.go.id> email: disnakerpmpptsp@malangkota.go.id
MALANG Kode Pos: 65132

FORMULIR

PERMOHONAN SERTIFIKAT PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA (SPP-IRT)

1. Nama jenis pangan	:
2. Nama dagang (jika ada)	:
3. Jenis kemasan	:
	a. Kemasan Primer
	b. Kemasan Sekunder
4. Berat bersih/isi bersih (g/mg/kg atau l/ml/dl)	:
5. Bahan baku dan bahan lainnya	:
6. Proses Produksi	:
7. Informasi tentang masa simpan (kedaluwarsa)	:
8. Informasi tentang kode produksi	:
9. Nama, alamat, kode pos dan nomor telepon IRT	:
10. Nama pemilik	:
11. Nama penanggungjawab	:

 Pemilik/ Penanggungjawab

 Ttd
 (.....)

Sumber : Data Primer, Dinas Tenaga Kerja dan PMPTSP Kota Malang

Berdasarkan gambar tersebut di atas terdapat beberapa data yang wajib diisi oleh pemohon untuk melakukan pengajuan penerbitan Sertifikat

Produksi Pangan Industri Rumah-Tangga (SPP-IRT), diantaranya yaitu :

- a. Nama Jenis Pangan;
- b. Nama Dagang (Jika ada);
- c. Jenis Kemasan, baik kemasan primer maupun kemasan sekunder; Kemasan pangan primer adalah bahan yang digunakan untuk mewadahi dan/atau membungkus pangan yang bersentuhan langsung dengan pangan.⁵³ Sedangkan yang dimaksud dengan kemasan pangan sekunder adalah bahan yang digunakan untuk mengemas kemasan primer, yang dapat dibuka tanpa mempengaruhi karakteristik produk, baik yang ditujukan untuk pengguna akhir atau konsumen maupun berfungsi sebagai tempat untuk memajang.⁵⁴
- d. Berat Bersih/Isi Bersih (yang dapat ditulis dalam satuan g/mg/kg atau l/ml/kl);
- e. Bahan Baku dan Bahan lainnya;
- f. Proses Produksi;
- g. Informasi tentang Masa Simpan (Kadaluarsa);
- h. Informasi tentang Kode Produksi;
- i. Nama, Alamat, Kode Pos dan Nomor Telepon Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP);
- j. Nama Pemilik Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP);
- k. Nama Penanggungjawab Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP); serta
- l. Dibubuhi dengan tanda tangan pemohon selaku Pemilik atau Penanggungjawab Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) yang mengajukan permohonan penerbitan SPP-IRT.

⁵³ Pasal 1 Angka 9 Peraturan BPOM No. 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga.

⁵⁴ Ibid., Pasal 1 Angka 10.

3. Penerimaan Permohonan Penerbitan SPP-IRT oleh Petugas Desk Pelayanan Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang.

Permohonan penerbitan SPP-IRT diterima oleh Walikota Malang melalui Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang dan dievaluasi kelengkapan dan kesesuaian berkas permohonannya yang meliputi :

- Formulir Permohonan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT);
- Fotocopy KTP Pemilik dan Penanggung jawab IRTP sebanyak 1 (satu) lembar;
- Pas Foto Pemilik IRTP dengan ukuran foto 3x4 sebanyak 1 (satu) lembar;
- Rancangan label kemasan produk IRTP;

Gambar 3.5 Label Kemasan Produk IRTP Kota Malang



Sumber : Data Primer, Dinas Tenaga Kerja dan PMPTSP Kota Malang

Berdasarkan gambar tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa rancangan label kemasan pada produk IRTP wajib ditulis dengan

Bahasa Indonesia, dan setidaknya tidaknya mencantumkan informasi terkait :

1. Nama makanan / minuman dan atau merek dagang;
2. Komposisi bahan yang digunakan;
3. Berat isi / bersih (g/mg/kg atau l/ml/kl);
4. Tanggal kadaluarsa yang ditulis dengan keterangan “Baik Digunakan Sebelum”;
5. Kode produksi;
6. Nama dan alamat industri rumah tangga

Contoh : Dikemas Oleh

Malang – Jawa Timur – Kode Pos- Indonesia

7. Nomor P-IRT.
- e. Sampel Produk Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP); dan
- f. Denah atau Peta Lokasi Kegiatan Industri Rumah Tangga Pangan.
4. Mengevaluasi kelengkapan serta kesesuaian atas berkas permohonan penerbitan SPP-IRT yang telah diajukan pemohon kepada Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang.
 - a. Walikota melalui Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang mengirimkan berkas permohonan penerbitan SPP-IRT ke Dinas Kesehatan Kota Malang untuk dievaluasi kelengkapan dan kesesuaian berkas permohonan dengan berdasarkan pada persyaratan yang telah ditetapkan dan yang terkait dengan keamanan pangan.
 - b. Jika ada kekurangan atau hal yang kurang tepat dalam isian dokumen dan kelengkapan berkas permohonan SPP-IRT, maka Dinas Kesehatan Kota Malang akan melakukan pembinaan kepada IRTP yang mengajukan permohonan, termasuk dalam hal perbaikan

rancangan label pangan pada produk IRTP agar sesuai dengan persyaratan tentang label pangan.

c. Apabila berkas permohonan penerbitan SPP-IRT telah sesuai dan lengkap serta tidak ada kekurangan apapun, maka Dinas Kesehatan Kota Malang akan memasukkan berkas permohonan penerbitan SPP-IRT tersebut ke dalam daftar peserta yang berhak untuk mengikuti kegiatan Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP). Daftar peserta tersebut nantinya akan dikirimkan Dinas Kesehatan Kota Malang kepada Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang. Selanjutnya, pihak-pihak pemohon penerbitan SPP-IRT yang telah lolos evaluasi berkas permohonan tersebut, akan diberi informasi oleh Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang terkait penyelenggaraan kegiatan Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP).

5. Penyelenggaraan Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP)

Berdasarkan Peraturan Walikota Malang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Dan Nonperizinan dari Walikota Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan PMPTSP Kota Malang diketahui bahwa kewenangan penerbitan Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan berada pada Dinas Tenaga Kerja dan PMPTSP Kota Malang. Namun pada saat ini, dinas yang menyelenggarakan Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP) di Kota Malang adalah Dinas Kesehatan. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya yaitu :

a. Dinas Tenaga Kerja dan PMPTSP Kota Malang tidak memiliki Tenaga Penyuluh Keamanan Pangan. Kriteria Tenaga Penyuluh Keamanan Pangan (PKP) adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memiliki Sertifikat Kompetensi di bidang penyuluhan keamanan pangan dari Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) terakreditasi dan ditugaskan oleh Bupati/Walikota c.q. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.⁵⁵

⁵⁵ Ibid., Lampiran 1 Huruf D No 3 (b)

b. Penyelenggaraan Penyuluhan Keamanan Pangan dikoordinasikan oleh Bupati/Walikota c.q. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

c. Kriteria Tenaga Penyuluh Keamanan Pangan (PKP) adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memiliki Sertifikat Kompetensi di bidang penyuluhan keamanan pangan dari Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) terakreditasi dan ditugaskan oleh Bupati/Walikota c.q. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

d. Narasumber pada penyuluhan keamanan pangan adalah tenaga PKP yang kompeten dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Balai Besar/Balai POM setempat atau dari instansi/lembaga lain yang kompeten di bidangnya.

e. Peserta Penyuluhan Keamanan Pangan adalah pemilik atau penanggung jawab IRTP.

f. Materi Penyuluhan Keamanan Pangan terdiri dari :

1. Materi Utama

- a) Peraturan perundang-undangan di bidang pangan
- b) Keamanan dan mutu pangan,
- c) Teknologi Proses Pengolahan Pangan
- d) Prosedur Operasi Sanitasi yang Standar (*Standard Sanitation Operating Procedure/SSOP*)
- e) Cara Produksi Pangan Yang Baik untuk Industri Rumah Tangga (CPPB-IRT)
- f) Penggunaan Bahan Tambahan Pangan (BTP)
- g) Persyaratan Label dan Iklan Pangan

2. Materi Pendukung

- a) Pencantuman label Halal
- b) Etika Bisnis dan Pengembangan Jejaring Bisnis IRTP

g. Metode Penyuluhan Keamanan Pangan

Materi penyuluhan keamanan pangan disampaikan dalam bentuk ceramah, diskusi, demonstrasi/peragaan simulasi, pemutaran video,

pembelajaran jarak jauh (*e-learning*) dan cara-cara lain yang mendukung pemahaman keamanan pangan.

h. Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan (SP-KP)

1. Sertifikat ini diterbitkan pada awalnya diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Kota Malang, namun dengan adanya pendelegasian wewenang dari Walikota Malang kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan PMPTSP Kota Malang yang terkait dengan kewenangan penerbitan SPP-IRT, maka penerbitan Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan (SP-KP) juga turut didelegasikan kewenangannya kepada Dinas Tenaga Kerja dan PMPTSP Kota Malang. Sehingga Dinas Kesehatan Kota Malang saat ini tidak memiliki wewenang untuk menerbitkan Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan (SP-KP). Dinas Tenaga Kerja dan PMPTSP Kota Malang menerbitkan Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan (SP-KP) bagi pemilik/penanggungjawab IRTP yang telah dinyatakan lulus dalam mengikuti Penyuluhan Keamanan Pangan dengan hasil evaluasi minimal nilai cukup (60). Bentuk SP-KP tersebut di atas adalah sebagai berikut :

**Gambar 3.6 Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan
Pemerintah Kota Malang**

PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS KESEHATAN KOTA MALANG
 Jl. Simpan Laksda Adi Sucipto No. 45 Malang
 KOTA MALANG - KODE POS 65124
 Telp : (0341) 406878 FAX : (0341) 406879
 E-MAIL : dinkes@malangkota.go.id

SERTIFIKAT PENYULUHAN KEAMANAN PANGAN (SPKP)

NOMOR : 2527/3573/2017

Diberikan Kepada :

Nama : QUSYAIRI
 Jabatan : PEMILIK
 Alamat : Jl. Zaenal Zakse IV / 15 Malang

Yang telah mengikuti Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP) dalam rangka pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga Nomor HK.03.1.23.04.12.2205 Tanggal 5 April 2012, yang diselenggarakan di :

Kota : Malang
 Propinsi : Jawa Timur
 Pada Tanggal : 22 Februari 2017

Dikeluarkan di : MALANG
 Pada Tanggal : 22 Februari 2017

Dr. dr. Rachmi Rachmi Nuswantari, MM.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19610905 198903 2 005

Sumber : Data Sekunder, Dinas Kesehatan Kota Malang

2. Penomoran Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan adalah sebagai berikut :

Nomor Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan terdiri dari 3 (tiga) kolom dan 9 (sembilan) angka sesuai contoh berikut :

123 / 4567 / 89

Keterangan penomoran adalah sebagai berikut :

a) angka ke-1,2,3 pada Kolom I, menunjukkan nomor urutan tenaga yang sudah memperoleh sertifikat di

Kabupaten/Kota yang bersangkutan, dan setiap awal tahun dimulai dengan angka 001;

b) angka ke-4,5,6,7 pada Kolom II, menunjukkan Provinsi dan Kabupaten/Kota penyelenggara penyuluhan keamanan pangan; dan angka ke-8,9 pada Kolom III, menunjukkan tahun penerbitan sertifikat.

6. Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan Industri Rumah Tangga

- Pemeriksaan sarana produksi pangan IRT dilakukan setelah pemilik atau penanggung jawab IRTP memiliki Sertifikat penyuluhan keamanan pangan
- Pemeriksaan sarana produksi pangan IRT dilakukan oleh tenaga Pengawas Pangan Kabupaten/Kota dengan dilengkapi surat tugas yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota c.q. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
- Kriteria Tenaga Pengawas Pangan Kabupaten/Kota atau DFI (District Food Inspector) adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memiliki Sertifikat kompetensi Pengawas Pangan Kabupaten/Kota.
- Pemeriksaan sarana produksi pangan IRTP sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Tata Cara Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan Industri Rumah Tangga.
- Di dalam pemeriksaaan sarana produksi pangan industri rumah tangga terdapat beberapa tingkatan atau level yang menunjukkan kelayakan sarana produksi IRTP. Tingkatan atau level kelayakan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2Kategori Level Hasil Pemeriksaan Sarana Produksi IRTP

Level	Keterangan
I	Terdapat penyimpangan terhadap seperangkat persyaratan Cara Produksi Pangan yang Baik untuk Industri Rumah Tangga (CPPB-IRT) yang terdiri atas :

	<p>a. penyimpangan yang mempunyai potensi mempengaruhi mutu (<i>wholesomeness</i>) produk pangan IRTP yang dilakukan sebanyak 1 (satu) kali;</p> <p>b. penyimpangan yang mempunyai potensi mempengaruhi efisiensi pengendalian keamanan produk pangan IRTP yang dilakukan sebanyak 1 (satu) kali;</p>
II	<p>Terdapat penyimpangan terhadap seperangkat persyaratan Cara Produksi Pangan yang Baik untuk Industri Rumah Tangga (CPPB-IRT) yang terdiri atas :</p> <p>a. penyimpangan yang mempunyai potensi mempengaruhi mutu (<i>wholesomeness</i>) produk pangan IRTP yang dilakukan sebanyak 1 (satu) kali;</p> <p>b. penyimpangan yang mempunyai potensi mempengaruhi efisiensi pengendalian keamanan produk pangan IRTP yang dilakukan sebanyak 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) kali;</p>
III	<p>Terdapat penyimpangan terhadap seperangkat persyaratan Cara Produksi Pangan yang Baik untuk Industri Rumah Tangga (CPPB-IRT) yang terdiri atas :</p> <p>a. penyimpangan yang mempunyai potensi mempengaruhi efisiensi pengendalian keamanan produk pangan IRTP yang dilakukan sebanyak lebih dari 4 (empat) kali;</p> <p>b. penyimpangan yang mempunyai potensi mempengaruhi keamanan produk pangan IRTP yang dilakukan sebanyak 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) kali;</p>

- IV Terdapat penyimpangan terhadap seperangkat persyaratan Cara Produksi Pangan yang Baik untuk Industri Rumah Tangga (CPPB-IRT) yang terdiri atas :
- penyimpangan yang mempunyai potensi mempengaruhi keamanan produk pangan IRT yang dilakukan sebanyak lebih dari sama dengan 5 (lima) kali;
 - penyimpangan yang akan mempengaruhi keamanan produk pangan IRT secara langsung yang dilakukan sebanyak lebih dari sama dengan 1 (satu) kali.

Jika hasil pemeriksaan sarana produksi menunjukkan bahwa IRT masuk level I – II maka pemohon dinyatakan lulus dalam tahap pemeriksaan sarana produksi pangan industri rumah tangga, sehingga pemohon berhak atas proses selanjutnya yakni tahap penerbitan SPP-IRT.

7. Pemberian Nomor P-IRT

- Nomor P-IRT minimal terdiri dari 15 (lima belas) digit sebagai berikut:

P-IRT No. 1234567890123-45

- Penjelasan 15 (lima belas) digit sebagai berikut :

- Digit ke 1 menunjukkan kode jenis kemasan, sebagaimana Kode Kemasan Pangan IRT terlampir sebagai berikut :

Tabel 3.3 Kode Kemasan Pangan IRT

Kode	Jenis Kemasan
1	Gelas
2	Plastik
3	Karton atau Kertas
4	Kaleng

5	Aluminium Foil
6	Lain-lain (misalnya : daun)
7	Komposit
8	Ganda

- 2) Digit ke 2 dan 3 menunjukkan nomor urut/kode jenis pangan IRTP, sebagaimana Kode Jenis Pangan IRTP terlampir sebagai berikut :

Tabel 3.4 Kode Jenis Pangan IRTP

Kode	Jenis Pangan
1	Hasil Olahan Daging Kering
2	Hasil Olahan Ikan Kering
3	Hasil Olahan Unggas Kering
4	Hasil Olahan Sayur
5	Hasil Olahan Kelapa
6	Tepung dan Hasil Olahannya
7	Minyak dan Lemak
8	Selai, Jeli, dan sejenisnya
9	Gula, Kembang Gula, dan Madu
10	Kopi dan Teh Kering
11	Bumbu
12	Rempah-rempah
13	Minuman Serbuk
14	Hasil Olahan Buah
15	Hasil Olahan Biji-bijian, Kacang-kacangan dan Umbi

- 3) Digit ke 4, 5, 6, dan 7 menunjukkan kode Provinsi dan Kabupaten/Kota, sebagaimana Kode Provinsi dan Kota Malang adalah 3573.

- 4) Digit ke 8 dan 9 menunjukkan nomor urut pangan IRTP yang telah memperoleh SPP-IRT di IRTP yang bersangkutan;
- 5) Digit ke 10, 11, 12 dan 13 menunjukkan nomor urut IRTP di Kota yang bersangkutan.
- 6) Nomor P-IRT diberikan untuk 1 (satu) jenis pangan IRT.

8. Penerbitan SPP-IRT

Pemohon yang telah dinyatakan lulus dalam mengikuti serangkaian proses dan tahapan dalam upaya pengajuan penerbitan SPP-IRT selanjutnya berhak untuk mendapatkan rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kota Malang agar supaya berkas permohonan penerbitan SPP-IRT nya segera diterbitkan. Rekomendasi tersebut diberikan oleh Dinas Kesehatan Kota Malang kepada Dinas Tenaga Kerja dan PMPTSP Kota Malang. Selanjutnya, Dinas Tenaga Kerja dan PMPTSP Kota Malang akan memproses penerbitan SPP-IRT tersebut dalam kurun waktu selambat-lambatnya 14 hari masa kerja.

Selain melakukan wawancara terkait syarat-syarat serta alur penerbitan SPP-IRT yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan PMPTSP Kota Malang, penulis juga menggunakan beberapa variabel yang terdapat di dalam teori implementasi guna menganalisis lebih dalam terkait ketentuan yang ada di dalam Pasal 3 huruf B angka 46 Peraturan Walikota Malang Nomor 3 Tahun 2020. Oleh karena itu, untuk melihat implementasi dari peraturan tersebut di atas, penulis menggunakan teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto, yang terdiri dari lima (5) faktor⁵⁶, dengan tujuan agar penulis dapat melihat bagaimana implementasi dan/atau keberlakuan hukum yang telah diatur di dalam peraturan walikota tersebut. Hasil analisa yang penulis dapatkan adalah sebagai berikut:

1. Faktor hukumnya sendiri

Pada faktor ini, memberikan arti bahwa hukum memiliki fungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Kepastian hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak. Sehingga dalam

⁵⁶ Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, Bandung : Rajawali Pres, 1996, Hlm. 62.

pelaksanaannya harus seimbang agar tidak terjadi pertentangan kepastian hukum. Hukum dalam arti material adalah peraturan yang tertulis, berlaku untuk umum dan dibuat oleh pemerintah pusat atau daerah yang berwenang serta berlaku sah. Peraturan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang pada dasarnya memiliki fungsi sebagai *social control*, yaitu mengontrol tingkah laku masyarakat dan tak terkecuali para pelaksana atau penyelenggara pemerintahan agar dapat terwujudnya sistem pemerintahan yang adil dan makmur.

Dalam penelitian ini yang dibahas oleh penulis yaitu Pasal 3 Huruf B Angka 46 Peraturan Walikota Malang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Dari Walikota Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Berdasarkan Pasal 3 Huruf B Angka 46 Peraturan Walikota Malang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Dari Walikota Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyatakan bahwa:

"Jenis-jenis Perizinan dan Nonperizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Malang di bidang Kesehatan yang kemudian didelegasikan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yaitu Penerbitan SPP-IRT."

Sebagaimana tujuan dari dibuatnya peraturan tersebut yaitu untuk memberikan pedoman atau acuan mengenai pendelegasian kewenangan perizinan dan nonperizinan dari Walikota kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam memberikan pelayanan publik di bidang perizinan berupa penerbitan SPP-IRT. Oleh karena itu, peraturan tersebut harus dibuat secara cermat, jelas, dan mudah untuk dimengerti agar tidak terjadi kekaburan atau menimbulkan multitafsir. Hukum pada Peraturan Walikota Malang Nomor 3 Tahun 2020 sebenarnya telah memberikan kepastian hukum terkait dengan pendelegasian kewenangan perizinan dan nonperizinan dari Walikota kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan PMPSTP Kota Malang,

namun patut diketahui bahwa di dalam peraturan walikota tersebut, jenis-jenis perizinan dan nonperizinan yang didelegasikan terdiri atas beberapa bidang perizinan yang tiap-tiap bidangnya memiliki jenis izin yang berjumlah cukup banyak. Sebagai contohnya, pada bidang izin Kesehatan, terdapat 52 jenis perizinan yang dilimpahkan. Namun sayangnya, pendelegasian dan/atau pelimpahan izin tersebut tidak disertai dengan lampiran yang memuat penjelasan terkait aturan pelaksanaan mengenai hal tersebut.

2. Faktor penegak hukum

Menurut Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa pihak yang dimaksud dalam faktor penegak hukum adalah sebuah instansi yang menjalankan peraturan perundang-undangan yang dimaksud dalam suatu penelitian tersebut. Penegak hukum atau dapat dikatakan orang yang bertugas menerapkan hukum memiliki ruang lingkup yang sangat luas karena meliputi mereka yang secara langsung bergerak di bidang penegakan hukum. Setiap penegak hukum memiliki kedudukan dan peranan masing-masing. Maka dapat dipahami bahwa seorang penegak hukum yang memiliki kedudukan tertentu dengan sendirinya mempunyai wewenang untuk melakukan sesuatu berdasarkan jabatannya. Penegak hukum yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu Dinas Tenaga Kerja dan PMPTSP Kota Malang, yang berdasarkan Pasal 3 Huruf B Angka 46 Peraturan Walikota Malang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Dari Walikota Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menjelaskan bahwa :

"Walikota mendelegasikan kewenangan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 kepada Kepala Dinas."

Apabila peraturan perundang-undangan yang dibentuk sudah baik, namun perilaku atau perbuatan penegak hukum dalam melaksanakan kewajiban yang ada dalam peraturan perundang-undangan tersebut kurang baik, maka dapat menimbulkan efek yang buruk dalam sistem

keberlakuan hukum. Jadi, apabila produk hukum yang mengaturnya sudah baik, namun tidak didukung oleh penegak hukum yang baik juga maka cukup sulit untuk mendapatkan hasil yang maksimal dalam proses melaksanakan wewenang yang sudah diatur dalam suatu produk hukum. Dalam menjalankan kewenangannya penegak hukum juga harus mengutamakan keadilan dan profesionalisme, sehingga dapat dijadikan sebagai panutan bagi masyarakat serta dipercayai oleh semua pihak termasuk dinas-dinas yang terkait, selain itu juga untuk menciptakan hubungan yang baik dengan masyarakat dalam menjalankan dan/atau melaksanakan keberlakuan atau penegakan hukum. Apabila hubungan antara penegak hukum dengan masyarakat baik maka sebuah peraturan perundang-undangan akan berjalan dengan baik, sesuai dengan tujuan dan fungsi dari peraturan perundang-undangan tersebut.

Dalam melaksanakan keberlakuan hukum dalam peraturan walikota tersebut di atas, Dinas Tenaga Kerja dan PMPTSP Kota Malang sudah melaksanakan standar pelayanan yaitu melalui sarana dan prasarana. Dalam hal ini sarana dan prasarana pelayanan yang diberikan Dinas Tenaga Kerja dan PMPTSP Kota Malang berupa sarana dan prasarana pengaduan atau keluhan masyarakat terkait pelayanan perizinan dan nonperizinan yang diberikan oleh dinas terkait, termasuk pelayanan terkait perizinan penerbitan SPP-IRT. Namun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini bukan terkait adanya sarana prasarana pelayanan pengaduan atau keluhan yang sudah disediakan oleh pihak Dinas Tenaga Kerja dan PMPTSP Kota Malang, akan tetapi terkait standar pelayanan dalam hal penanganan pengaduan atau keluhan pelanggan. Berdasarkan data yang diperoleh penulis serta fakta yang terjadi di lapangan didapatkan bahwa masih banyak pengaduan atau keluhan masyarakat yang belum ditangani oleh penyelenggara pelayanan yaitu Dinas Tenaga Kerja dan PMPTSP Kota Malang.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa alur pengelolaan penanganan pengaduan atau keluhan yang dimiliki oleh

Dinas Tenaga Kerja dan PMPTSP Kota Malang adalah sebagai berikut:

- a. Masyarakat Kota Malang yang menjadi Pemohon dapat datang langsung untuk melakukan pengaduan atau keluhan terkait pelayanan perizinan dan nonperizinan yang telah dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan PMPTSP Kota Malang. Untuk melakukan pengaduan dan/atau keluhan tersebut, pemohon dihibmabu untuk menuju Bidang Pengendalian, Pengaduan, Data dan Informasi, khususnya menghadap langsung ke Seksi Kebijakan, Pengaduan dan Penyuluhan Layanan. Lokasi tersebut bertempat di Lantai 3 Gedung A Perkantoran Terpadu Kota Malang.
- b. Selanjutnya pegawai yang bertugas pada Seksi Kebijakan, Pengaduan dan Penyuluhan Layanan Dinas Tenaga Kerja dan PMPTSP Kota Malang akan menerima pengaduan atau keluhan yang berasal dari masyarakat tersebut, untuk kemudian pengaduan dan/atau keluhan tersebut akan diteruskan ke bidang terkait, sehingga nantinya dapat langsung dilakukan penanganan terkait pengaduan dan/atau keluhan tersebut.

Namun pada pelaksanaannya, Dinas Tenaga Kerja dan PMPTSP Kota Malang sebagai penegak hukum belum mampu secara sigap melakukan penanganan terkait pengaduan dan/atau keluhan yang telah disampaikan oleh masyarakat. Kurang sigapnya penegak hukum atau implementor dalam melakukan penanganan pengaduan dan/atau keluhan masyarakat terkait tidak dapat diprosesnya penerbitan SPP-IRT mengakibatkan terus bertambahnya pengaduan dan/atau keluhan masyarakat terkait hal tersebut. Sehingga berimbas pada langkah penanganan aduan/keluhan yang diberikan akan semakin tidak maksimal.

Belum maksimalnya pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan PMPTSP Kota Malang dalam hal terkait penerbitan SPP-IRT, membuat masyarakat

terutama pelaku IRTP di Kota Malang yang menjadi pemohon penerbitan SPP-IRT merasa kecewa dan tidak puas terhadap pelayanan yang diberikan Dinas Tenaga Kerja dan PMPTSP Kota Malang. Hal tersebut dikarenakan hak mereka tidak terpenuhi secara maksimal oleh Dinas Tenaga Kerja dan PMPTSP Kota Malang sebagai implementor. Berdasarkan faktor penegak hukum, dapat dijelaskan bahwa Dinas Tenaga Kerja dan PMPTSP Kota Malang belum efektif dalam melaksanakan keberlakuan hukum yang telah diatur di dalam Pasal 3 Huruf B Angka 46 Peraturan Walikota Malang Nomor 3 Tahun 2020.

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung

Sarana atau fasilitas merupakan hal yang penting dalam mendukung penegak hukum dalam melaksanakan pelayanan publik dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut diantaranya yakni sumber daya manusia, peralatan yang memenuhi kebutuhan serta keuangan atau anggaran yang cukup. Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan hasil bahwa pendelegasian kewenangan penerbitan SPP-IRT dari Walikota kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan PMPTSP Kota Malang, belum disertai dengan sarana atau fasilitas pendukung. Hal tersebut diketahui berdasarkan fakta di lapangan yang menunjukkan bahwa sampai saat ini Dinas Tenaga Kerja dan PMPTSP Kota Malang belum memiliki tenaga kerja yang memiliki latar belakang di bidang kesehatan. Padahal, hal tersebut penting dalam melaksanakan dan/atau memberlakukan hukum pada Pasal 3 Huruf B Angka 46 Peraturan Walikota Malang Nomor 3 Tahun 2020 yang mengatur terkait penerbitan SPP-IRT. Frasa penting di dalam kalimat tersebut di atas diartikan bahwa di dalam memberlakukan hukum terkait dengan penerbitan SPP-IRT, keberadaan tenaga pendukung dengan latar belakang pendidikan maupun pengalaman di bidang kesehatan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan mengimplementasikan aturan tersebut. Dengan dimilikinya tenaga pendukung yang memiliki kompetensi serta berkapabilitas dalam bidang SPP-IRT, maka akan menciptakan kemudahan di dalam proses

pelaksanaannya. Sehingga berdasarkan faktor sarana atau fasilitas pendukung, dapat dijelaskan bahwa Dinas Tenaga Kerja dan PMPTSP Kota Malang belum efektif dalam melaksanakan keberlakuan hukum yang telah diatur di dalam Pasal 3 Huruf B Angka 46 Peraturan Walikota Malang Nomor 3 Tahun 2020.

4. Faktor masyarakat

Masyarakat merupakan faktor yang berpengaruh juga di dalam pemberlakuan dan/atau mengimplementasikan suatu ketentuan hukum. Apabila masyarakat tidak sadar akan hukum atau tidak menaati hukum maka tidak akan timbul pelaksanaan dari suatu berlakunya suatu produk hukum. Tujuan dari dibentuknya atau dibuatnya peraturan atau produk hukum adalah untuk memberi kemanfaatan, keadilan, dan keadilan hukum. Hal tersebut sejalan dengan tujuan dibentuk atau dibuatnya Peraturan Walikota Malang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Dari Walikota Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Oleh karena itu kesadaran masyarakat dalam melaksanakan produk hukum yang berlaku merupakan pandangan abstrak yang ada di dalam diri manusia, pandangan abstrak tersebut maksudnya mengenai keserasian antara ketertiban dan ketentraman yang diinginkan atau sepantasnya. Maka dapat disimpulkan kesadaran hukum adalah kesadaran atau nilai-nilai yang ada di dalam diri manusia yang berhubungan dengan hukum yang ada dan/atau berlaku yang diterapkan dalam lingkungan kehidupan masyarakat.

Pada penelitian ini, faktor masyarakat memiliki titik berat pada kesadaran masyarakat terkait pendelegasian kewenangan penerbitan SPP-IRT dari Walikota kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan PMPSTP Kota Malang. Masyarakat Kota Malang sebelumnya memiliki pemahaman dan kesadaran bahwa yang berwenang di dalam pengurusan serta penerbitan SPP-IRT adalah Dinas Kesehatan Kota Malang. Namun dengan dikeluarkan Peraturan Walikota Malang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang

Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Dari Walikota Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, maka masyarakat diarahkan untuk memahami dan menyadari bahwa pada saat ini kewenangan pengurusan serta penerbitan SPP-IRT telah beralih kepada Dinas Tenaga Kerja dan PMPTSP Kota Malang. Kesadaran masyarakat akan hal tersebut, seharusnya juga diikuti oleh rasa maklum masyarakat akan kebaruan pelimpahan wewenang terkait penerbitan SPP-IRT kepada Dinas Tenaga Kerja dan PMPTSP. Sehingga apabila di dalam pelaksanaannya masih terdapat hambatan dan/atau kendala, masyarakat diharapkan selain dapat memberikan koreksi dan/atau pengaduan kepada Dinas Tenaga Kerja dan PMPTSP selaku pihak implementor, juga dapat ikut berpartisipasi untuk merumuskan solusi dari hambatan dan/atau kendala di dalam penerbitan SPP-IRT yang pada akhirnya bertujuan sebagai pemenuhan hak masyarakat sebagai pemohon pelayanan perizinan SPP-IRT.

5. Faktor budaya hukum atau kebudayaan

Menurut Soerjono Soekanto, kebudayaan memiliki fungsi yang besar bagi manusia sebagai masyarakat untuk mengatur perilaku manusia dalam bertindak dan berbuat. Oleh karena itu, dapat diartikan bahwa kebudayaan adalah suatu garis inti mengenai perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai perbuatan mana yang boleh dilakukan dan perbuatan mana yang dilarang untuk dilakukan. Dalam penelitian ini, penulis membagi budaya hukum dalam 2 subjek yang berperan dalam penelitian ini, yaitu:

a. Dinas Tenaga Kerja dan PMPTSP Kota Malang

Masih banyaknya pengaduan atau keluhan yang belum ditangani oleh pihak Dinas Tenaga Kerja dan PMPTSP Kota Malang selaku implementor ketentuan hukum di dalam Pasal 3 Huruf B Angka 46 Peraturan Walikota Malang Nomor 3 Tahun 2020 membuktikan bahwa kurang maksimalnya pihak Dinas Tenaga Kerja dan PMPTSP dalam mengimplementasikan dan/atau

memberlakukan kewajibannya khususnya dalam hal pelayanan penerbitan perizinan SPP-IRT yang diajukan oleh pelaku IRTP di Kota Malang, oleh karena itu menurut penulis, belum terdapat efektivitas terkait budaya tanggung jawab yang seharusnya ditanamkan oleh penyelenggara kewenangan, dalam hal ini penyelenggara kewenangan yaitu Dinas Tenaga Kerja dan PMPTSP Kota Malang.

b. Masyarakat Pelaku IRTP (Pemohon Penerbitan SPP-IRT)

Budaya hukum yang diharapkan dari masyarakat khususnya pelaku IRTP di Kota Malang yang berperan sebagai pemohon penerbitan SPP-IRT, adalah pengetahuan serta pemahaman terkait dengan aturan dan kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah Kota Malang dalam mengatur pendelegasian kewenangan penerbitan SPP-IRT. Sehingga masyarakat tidak perlu kebingungan lagi dalam menetapkan dinas mana yang berwenang dalam penerbitan SPP-IRT. Hal ini dikarenakan pada fakta di lapangan, masih terdapat beberapa pelaku IRTP yang memiliki pemahaman bahwa pengurusan serta penerbitan SPP-IRT masih berada pada kewenangan Dinas Kesehatan Kota Malang. Selain itu, masyarakat memiliki budaya tanggung jawab untuk dapat berperan aktif dalam memberikan pengawasan terhadap kinerja Dinas Tenaga Kerja dan PMPTSP secara menyeluruh yakni dengan adanya saran dan kritik yang diberikan secara langsung pada Dinas Tenaga Kerja dan PMPTSP melalui sarana pengaduan atau keluhan yang telah disediakan.

Selain dengan teori efektivitas hukum, keberlakuan hukum dalam pelaksanaannya dapat dilihat melalui beberapa indikator yang terdapat di dalam teori implementasi, diantaranya adalah sebagai berikut :

a) Indikator Komunikasi

Indikator pertama yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan yang dituangkan di dalam suatu

peraturan perundang-undangan adalah komunikasi. Di dalam penelitian ini, kebijakan yang dicanangkan oleh Pemerintah Daerah Kota Malang dituangkan ke dalam Peraturan Walikota, yakni tepatnya Peraturan Walikota Malang Nomor 3 Tahun 2020. Pada bahasan di dalam penelitian ini, komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan terkait penerbitan SPP-IRT di Kota Malang. Hal ini dikarenakan implementasi yang efektif akan terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan.⁵⁷ Pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan apabila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus ditransmisikan dan/atau dikomunikasikan kepada bagian personalia yang tepat. Selain itu, kebijakan yang dikomunikasikan pun harus tepat, akurat, dan konsisten. Komunikasi dan/atau pentransmisian informasi diperlukan agar para pembuat keputusan dan para implementor akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan dalam masyarakat.

Pada penelitian ini, yang memiliki peran sebagai para pembuat keputusan adalah Pemerintah Kota Malang yang diwakili oleh seorang Walikota. Sedangkan yang memiliki peran sebagai pihak implementor adalah Dinas Tenaga Kerja dan PMPTSP Kota Malang yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas. Komunikasi antara Pemerintah Kota Malang dengan Dinas Tenaga Kerja dan PMPTSP Kota Malang menjadi suatu hal yang penting dalam mengimplementasikan peraturan. Hal tersebut dikarenakan, pihak pertama yang mengetahui dan memahami secara jelas terkait arah kebijakan, tujuan kebijakan maupun hasil yang ingin dicapai dalam

⁵⁷ Edward III, George C (edited), **Public Policy Implementing**, Jai Press Inc, London England, 1990, hlm 149-154.

penyelenggaraan kebijakan tersebut adalah Pemerintah Kota Malang. Sedangkan wewenang terkait kebijakan tersebut pada akhirnya didelegasikan kepada Dinas Tenaga Kerja dan PMPTSP Kota Malang yang berperan sebagai implementor kebijakan. Apabila komunikasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Malang bersama Dinas Tenaga Kerja dan PMPTSP Kota Malang mengalami kesalahan, baik dalam kesalahpahaman informasi maupun ketidakpahaman informasi terkait pendelegasian wewenang penerbitan SPP-IRT bagi IRTP Kota Malang, maka dalam proses maupun pelaksanaan implementasi peraturan walikota tersebut, akan menimbulkan berbagai kendala serta permasalahan yang akan menghambat penerbitan SPP-IRT oleh implementor. Hal tersebut sejalan dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Dra. Nur Chamidah selaku Kasie. Verifikasi dan Validasi Bidang Perizinan dan Nonperizinan Ekonomi, Pariwisata dan Sosial Budaya Dinas Tenaga Kerja dan PMPTSP Kota Malang yang menyatakan⁵⁸ :

"Sebenarnya dari pihak Dinas Tenaga Kerja dan PMPTSP Kota Malang tidak ada masalah ya jika Walikota mendelegasikan wewenang penerbitan SP-KP dan SPP-IRT kepada kami. Namun yang menjadi permasalahan itu terletak pada kejelasan informasi dari pihak Pemerintah Kota Malang sendiri. Mereka tidak memberikan sosialisasi dan pemahaman yang rinci serta jelas terkait hal-hal yang bersangkutan dengan penyelenggaraan izin kesehatan ini sendiri. Jadi ya kami sempat bingung dan merasa kurang persiapan dengan pendelegasian wewenang terkait penerbitan izin kesehatan, ya termasuk penerbitan SPP-IRT ini yang juga termasuk di dalam kategori izin kesehatan."

Selain pernyataan tersebut di atas, penulis juga melakukan wawancara kepada Bapak Sabatus Poncokanko selaku Pengadministrasi Perizinan Seksi Penetapan dan Penerbitan Perizinan dan Nonperizinan Ekonomi, Pariwisata dan Sosial Budaya

⁵⁸ Hasil Wawancara dengan Ibu Dra. Nur Chamidah selaku Kasie. Verifikasi dan Validasi Bidang Perizinan dan Nonperizinan Ekonomi, Pariwisata dan Sosial Budaya Dinas Tenaga Kerja dan PMPTSP Kota Malang.

Dinas Tenaga Kerja dan PMPTSP Kota Malang. Hasil yang didapat adalah sebagai berikut⁵⁹ :

"Pendelegasian wewenang terkait penerbitan SPP-IRT bagi IRTP Kota Malang kira-kira dimulai pada akhir bulan Februari di tahun 2020 kemarin. Iya benar, kami memang tidak ada masalah terkait pendelegasian wewenang tersebut. Justru kami merasa bahwa Pemerintah Kota Malang memberikan kepercayaannya kepada kami untuk berperan sebagai implementor dalam wewenang tersebut. Namun benar adanya bahwa kami merasa komunikasi yang terjalin antara Pemerintah Kota Malang sebagai pemberi delegasi kurang. Ditambah pada saat itu, di Indonesia sedang gencar-gencarnya pandemi Covid 19, jadi kami merasa kebingungan. Sehingga pada saat itu, selain berpedoman pada peraturan walikota tersebut untuk melaksanakan wewenang penerbitan SPP-IRT, kami secara mandiri mempelajari peraturan-peraturan pedoman lain, seperti Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian SPP-IRT. Jadi ya kita belajar mandiri."

Di sisi lain, Ibu Virda Ardiyanie, SH selaku Analis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Seksi Verifikasi dan Validasi Perizinan dan Nonperizinan Ekonomi, Pariwisata dan Sosial Budaya Dinas Tenaga Kerja dan PMPTSP Kota Malang mengemukakan pendapatnya terkait hal tersebut. Ia mengatakan bahwa⁶⁰ :

"Kalau dilihat dari mulusnya komunikasi atau tidak dalam pendelegasian wewenang penerbitan SPP-IRT ini saya melihat dari kurang lebih beberapa hal ya, yang pertama tentang penyaluran komunikasi mengenai hal terkait itu sendiri. Karena seharusnya informasi yang terkandung di dalam komunikasi itu haruslah jelas dan tidak membingungkan atau ambigu. Karena sepemahaman saya, kalau komunikasi itu disalurkan dengan baik, maka kami sebagai pihak implementor bisa melaksanakan suatu implementasi yang baik pula. Tapi kalau ada salah pengertian dalam penyaluran komunikasi tentang hal-hal yang terkait dengan wewenang penerbitan SPP-IRT ya nanti bakal jadi miskomunikasi. Nah miskomunikasi ini bisa terjadi antara

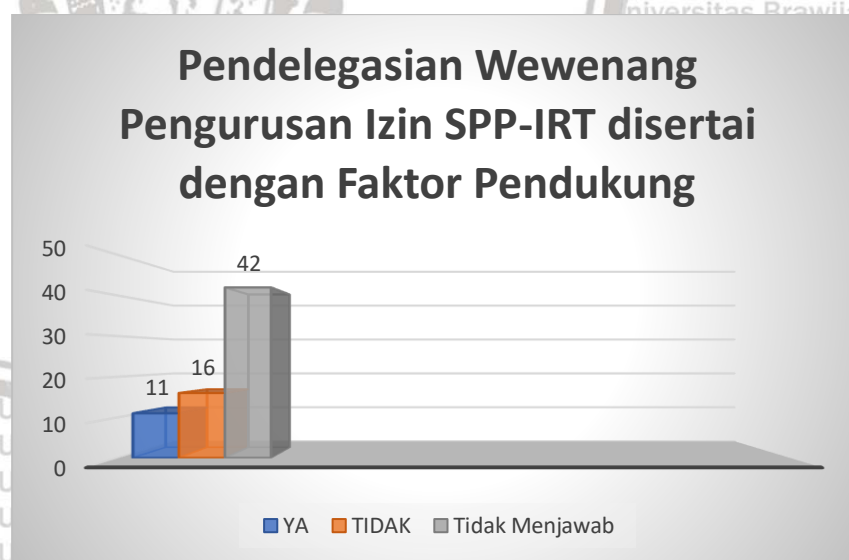
⁵⁹ **Hasil Wawancara** dengan Bapak Sabatus Poncokanko selaku Pengadministrasi Perizinan Seksi Penetapan dan Penerbitan Perizinan dan Nonperizinan Ekonomi, Pariwisata dan Sosial Budaya Dinas Tenaga Kerja dan PMPTSP Kota Malang.

⁶⁰ **Hasil Wawancara** dengan Ibu Virda Ardiyanie, SH selaku Analis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Seksi Verifikasi dan Validasi Perizinan dan Nonperizinan Ekonomi, Pariwisata dan Sosial Budaya Dinas Tenaga Kerja dan PMPTSP Kota Malang.

Pemerintah Kota Malang selaku pemberi delegasi dengan kami sebagai penerima delegasi, dan bisa terjadi pula antara kami sebagai implementor dengan pelaku IRTP Kota Malang yang menjadi pemohon penerbitan SPP-IRT.”

b) Indikator Sumber Daya

Variabel kedua yang mempengaruhi keberhasilan implementasi wewenang penerbitan SPP-IRT oleh Dinas Tenaga Kerja dan PMPTSP Kota Malang yang diatur dengan peraturan walikota terkait adalah sumber daya. Sumber daya merupakan hal penting lainnya dalam mengimplementasikan kebijakan. Untuk mengetahui dan menganalisis lebih lanjut terkait dengan variable ini, penulis membagikan kuesioner terkait faktor pendukung yang menyertai pendelegasian wewenang pengurusan SPP-IRT kepada Dinas Tenaga Kerja dan PMPTSP Kota Malang. Berdasarkan kuesioner tersebut, didapatkan data sebagai berikut :



Grafik3.4 Sumber Primer, Dinas Tenaga Kerja dan PMPTSP Kota Malang

Berdasarkan grafik tersebut di atas, dapat diketahui bahwa 11 pegawai menyatakan bahwa pendelegasian wewenang pengurusan izin SPP-IRT kepada Dinas Tenaga Kerja dan PMPTSP Kota Malang disertai dengan

pemberian faktor pendukung. Namun selanjutnya berdasarkan data tersebut di atas, juga didapatkan hasil bahwa masih terdapat 16 pegawai yang menyatakan bahwa pendelegasian wewenang pengurusan izin SPP-IRT kepada Dinas Tenaga Kerja dan PMPTSP Kota Malang tidak disertai dengan pemberian faktor pendukung. Selanjutnya, 42 pegawai memilih untuk tidak menjawab terkait hal tersebut. Sejalan dengan data yang telah didapatkan di atas, penulis menemukan beberapa indikator di dalam variabel sumber daya yang berkaitan dengan Implementasi Pasal 3 Huruf B Angka 46 Peraturan Walikota Malang No. 3 Tahun 2020 terkait Penerbitan SPP-IRT, diantaranya yakni sebagai berikut :

1. Staf (Sumber Daya Manusia)

Sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh karena staf yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak kompeten di bidangnya. Penambahan jumlah staf dan implementor saja tidak cukup, tetapi diperlukan juga kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapabel) dalam mengimplementasikan kebijakan atau melaksanakan tugas yang diinginkan oleh kebijakan itu sendiri. Dalam bahasan pada penelitian ini, yang memiliki peran sebagai staf dalam wewenang penerbitan SPP-IRT adalah pegawai Dinas Tenaga Kerja dan PMPTSP yang khususnya membidangi perizinan dan nonperizinan ekonomi, pariwisata, dan sosial budaya. Dengan pendelegasian wewenang tersebut, Dinas Tenaga Kerja dan PMPTSP Kota Malang, terhitung sejak bulan Maret tahun 2020, membuka desk pelayanan baru yakni desk pelayanan nomor 12 yang berada di gedung A lantai 1 Perkantoran Terpadu Pemerintah Kota Malang. Desk pelayanan tersebut memiliki 2 staff yang bertugas melayani pengurusan terkait izin-izin di

bidang kesehatan, termasuk pengelolaan penerbitan SPP-IRT. Namun yang patut diperhatikan adalah bahwasanya staff yang bertugas melayani izin bidang tersebut mengaku tidak kompeten dalam bidang kesehatan. Hal ini selain dikarenakan pendelegasian wewenang yang belum lama diberikan, namun juga dikarenakan staff pelayanan tersebut belum memiliki pengetahuan serta pengalaman yang kompleks terkait dengan SPP-IRT. Sehingga menyebabkan terjadinya ketidaksamaan informasi terkait pengelolaan penerbitan SPP-IRT yang didapat oleh para pelaku IRTP Kota Malang yang sempat menjadi pemohon penerbitan SPP-IRT. Hal tersebut sejalan dengan wawancara yang dilakukan penulis bersama dengan Bapak Ismail selaku pelaku IRTP Kota Malang yang mengemukakan sebagai berikut⁶¹ :

"Saya bingung mbak, ini sebenarnya alur pengajuan penerbitan SPP-IRT seperti apa. Sebelumnya saya mendapat informasi dari rekan-rekan sesama pelaku industri rumah tangga pangan kalau pengelolaan penerbitan SPP-IRT diurus ke Dinas Kesehatan. Tapi saat saya ke Dinas Kesehatan, petugas di sana bilang kalau pengelolaan penerbitan SPP-IRT pada saat ini dialihkan kesini (Dinas Tenaga Kerja dan PMPTSP Kota Malang). Lah tapi saat saya datang kesini, pengajuan penerbitan SPP-IRT saya tidak diterima. Kata petugasnya pengajuan penerbitan SPP-IRT tidak bisa diterima kalau saya belum mengikuti penyuluhan keamanan pangan. Setelah itu, pada saat saya tanyakan tentang apa itu penyuluhan keamanan pangan dan bagaimana mekanisme atau hal-hal yang terkait dengan penyuluhan tersebut, petugasnya tidak tahu secara pasti juga. Saya sebagai pemohon merasa dirugikan jika ada kesimpang-siuran dan ketidakjelasan informasi seperti ini. Tujuan saya mengurus penerbitan SPP-IRT ini kan untuk mengembangkan industri kecil-kecilan ini, tapi kok malah dioper-oper seperti ini mbak."

⁶¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Ismail selaku Pelaku IRTP yang menjadi pemohon penerbitan SPP-IRT Kota Malang.

2. Informasi;

Dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk, diantaranya yaitu :

a) informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Implementor harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan saat mereka diberi perintah.

b) informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Implementor harus mengetahui apakah orang yang terlibat di dalam pelaksanaan kebijakan tersebut patuh terhadap hukum.

c) Wewenang; pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Ketika wewenang nihil, maka kekuatan para implementor dimata publik tidak terlegitimasi, sehingga dapat menggagalkan proses implementasi kebijakan.

c) Indikator Struktur Birokrasi

Keberhasilan implementasi kebijakan publik adalah struktur birokrasi. Walaupun sumber daya untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan, dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat dilaksanakan atau direalisasikan karena terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebabkan sumber daya-sumber daya menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya kebijakan.

Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat

mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik.⁶²

Selain itu, kinerja struktur birokrasi dipengaruhi oleh keberadaan Standar Operasional Prosedur (SOP). Dengan adanya SOP di dalam struktur birokrasi, maka akan memberikan arah serta kemudahan bagi pelaksana struktur birokrasi dalam melaksanakan tugas serta fungsinya masing-masing. Namun dalam hal penerbitan SP-KP maupun SPP-IRT, Dinas Tenaga Kerja dan PMPTSP Kota Malang belum memiliki SOP dalam pelaksanaannya. Sehingga pelaksanaan wewenang penerbitan SPP-IRT tidak memiliki arah pedoman yang jelas dan paten. Belum adanya SOP yang mengatur terkait penerbitan SPP-IRT ini menimbulkan kendala serta permasalahan yang menghambat penerbitan SPP-IRT oleh Dinas Tenaga Kerja dan PMPTSP Kota Malang. Hal tersebut didukung dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Ibu Woro Tanty Poerwandari, SH selaku Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan PMPTSP Kota Malang yang menyatakan⁶³:

"Pendelegasian wewenang penerbitan SPP-IRT ini kan masih bisa dibilang baru ya di kami, masih belum lama. Jadi kami belum memiliki SOP-nya. Sebelumnya kan yang berwenang untuk menerbitkan SPP-IRT ini adalah Dinas Kesehatan. Dinas Kesehatan juga yang menyelenggarakan penyuluhan keamanan pangan, jadi sepaket. Setelah pemohon mengikuti dan dinyatakan lulus dalam penyuluhan keamanan pangan disana, pemohon itu langsung bisa mengajukan penerbitan SPP-IRT di Dinas Kesehatan. Sedangkan untuk kami, kami hanya berwenang dalam penerbitan SPP-IRTnya. Kami tidak berwenang untuk menyelenggarakan penyuluhan keamanan pangan, karena staff kami tidak memiliki kompetensi serta keahlian di bidang tersebut. Maka dari itu yang menyelenggarakan penyuluhan keamanan pangan ya tetap Dinas Kesehatan, karena itu tupoksi mereka. Namun kebanyakan dari pemohon mengalami kesalahpahaman. Pemohon berpikir bahwa kami yang tidak bersedia menerima

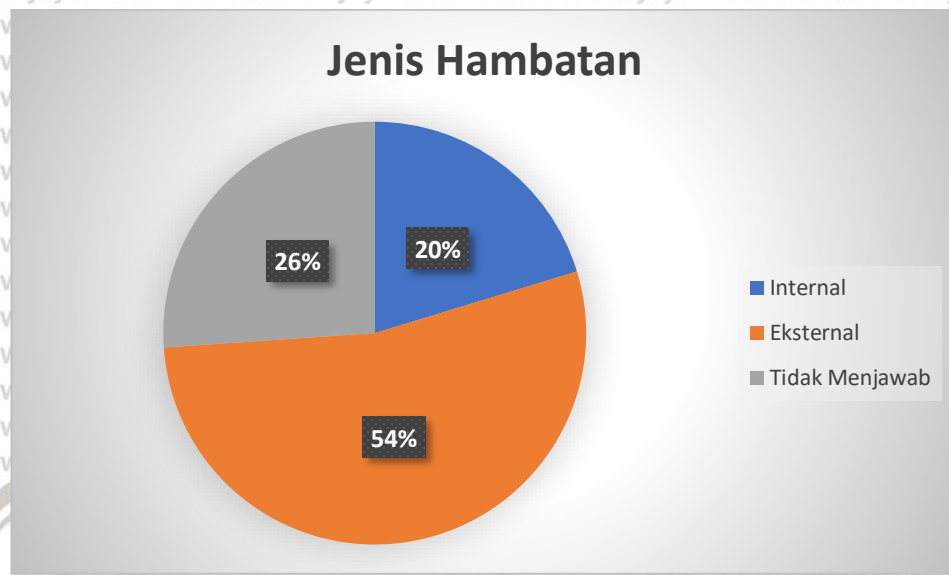
⁶² Tabrani Rusyan, **Pendekatan dalam Proses Belajar Mengajar**, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 1992, hlm 4.

⁶³ Hasil wawancara dengan Ibu Woro Tanty Poerwandari, SH selaku Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan PMPTSP Kota Malang.

permohonan pengajuan penerbitan SPP-IRT nya. Padahal kami hanya ingin meminimalisir terjadinya pengendapan pengajuan izin yang tidak dapat diproses. Kan percuma juga jika pemohon mengajukan penerbitan SPP-IRT kepada kami, namun berkasnya tidak bisa kami proses karena pemohon tersebut belum memiliki SP-KP. Sedangkan SP-KP merupakan syarat utama dalam penerbitan SPP-IRT. Jadi kami juga bingung, baiknya bagaimana. Kalau kami menerima berkas pengajuan tersebut, risikonya terjadi penumpukan berkas, karena kami tidak hanya melayani satu jenis izin saja. Tapi jika kami menolak pengajuan tersebut, kami dianggap melanggar maktlumat pelayanan kami. Jadi untuk saat ini, sedang kami usahakan yang terbaik untuk semua pihak.”

2. **Kendala serta hambatan yang dihadapi oleh Dinas Tenaga Kerja dan PMPTSP Kota Malang dalam mengimplementasikan Pasal 3 Huruf B Angka 46 Peraturan Walikota Malang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan dari Walikota Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

Pasal yang dijadikan pembahasan oleh penulis di dalam penelitian ini yaitu pasal 3 huruf B angka 46 Peraturan Walikota Malang yang mengatur terkait pendelegasian wewenang penerbitan izin SPP-IRT kepada Dinas Tenaga Kerja dan PMPTSP Kota Malang. Pendelegasian wewenang penerbitan SPP-IRT yang diberikan Walikota Malang kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan PMPTSP Kota Malang tersebut dalam pelaksanaannya ternyata belum berjalan dengan baik dan sesuai dengan perencanaan serta strategi yang dicanangkan pada awalnya. Terdapat beberapa faktor yang menjadi kendala dan permasalahan yang menyebabkan terhambatnya proses penerbitan SPP-IRT bagi pelaku IRTP di Kota Malang. Kendala merupakan salah satu hal yang menjadikan suatu peraturan perundang-undangan menjadi tidak dapat terimplementasikan dan tidak berjalan sesuai dengan fungsi dan tujuannya. Berdasarkan hasil penelitian penulis di lapangan, terdapat data sebagai berikut :



Grafik3.5 Sumber Primer, Dinas Tenaga Kerja dan PMPTSP Kota Malang

Berdasarkan grafik tersebut di atas, maka diketahui bahwa 54% pegawai yakni sejumlah 37 orang menjawab bahwa kendala yang paling berpengaruh di dalam mengimplementasikan Pasal 3 Huruf B Angka 46 Peraturan Walikota Malang No. 3 Tahun 2020 terkait Penerbitan SPP-IRT adalah kendala yang berasal dari luar (eksternal). Sedangkan 20% pegawai yakni sejumlah 14 orang menjawab bahwa kendala yang paling berpengaruh di dalam mengimplementasikan Pasal 3 Huruf B Angka 46 Peraturan Walikota Malang No. 3 Tahun 2020 terkait Penerbitan SPP-IRT adalah kendala yang berasal dari dalam (internal). Selanjutnya, 26% pegawai yakni sejumlah 18 orang memilih untuk tidak menjawab.

Dalam penelitian ini faktor kendala atau permasalahan tersebut dapat dibagi menjadi 2 yaitu :

- 1) Kendala Internal
 - a) Penegak Hukum

Dalam pelaksanaan kebijakan tertentu memiliki berbagai kendala yang ditemukan penegak hukum dalam menjalankan penegakan hukum. Dalam penelitian ini kendala internal dalam melaksanakan suatu kebijakan Pasal 3 huruf B angka

46 Peraturan Walikota Malang Nomor 3 Tahun 2020 yaitu berasal dari penegak hukum itu sendiri. Menurut hasil wawancara penulis dengan Bapak Drs. Rudi Cahyono Catur Utomo selaku Kasie. Data dan Informasi Dinas Tenaga Kerja dan PMPTSP Kota Malang, ditemukan beberapa kendala dalam percepatan pelaksanaan permohonan penerbitan perizinan SPP-IRT yang diajukan oleh masyarakat selaku pelaku IRTP di Kota Malang. Kendala yang dihadapi oleh Dinas Tenaga Kerja dan PMPTSP Kota Malang selaku penyelenggara dan/atau penegak hukum dalam melaksanakan kebijakan Pasal 3 Huruf B Angka 46 Peraturan Walikota Malang Nomor 3 Tahun 2020 tersebut yaitu Pertama, Sumber Daya Manusia (SDM) atau pegawai di Dinas Tenaga Kerja dan PMPTSP Kota Malang rata-rata tidak memiliki *background* di bidang kesehatan. Sehingga Dinas Tenaga Kerja dan PMPTSP Kota Malang mengalami kesulitan dalam mengimplementasikan delegasi wewenang penerbitan SPP-IRT tersebut.

b) Sarana atau Fasilitas Pendukung

Dalam melaksanakan suatu kebijakan perizinan, penegak hukum juga harus didukung dengan sarana atau fasilitas yang memadai agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan memberikan kepuasan kepada masyarakat sebagai pemohon, namun tidak dapat dipungkiri dalam melaksanakan kebijakan tersebut terdapat kendala-kendala. Dalam penelitian ini kendala yang dihadapi pihak Dinas Tenaga Kerja dan PMPTSP Kota Malang selaku penyelenggara dan/atau penegak hukum dalam melaksanakan kewajibannya untuk memproses penerbitan izin SPP-IRT di Kota Malang sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 3 Huruf B Angka 46 Peraturan Walikota Malang Nomor 3 Tahun 2020, selain kendala pada penegak hukum juga terdapat kendala terhadap ketersediaan sarana

atau fasilitas yang menunjang dalam melaksanakan kebijakan tersebut. Kendala-kendala tersebut yaitu pertama kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung proses penerbitan SPP-IRT oleh Dinas Tenaga Kerja dan PMPTSP Kota Malang. Sarana tersebut dapat berupa tenaga pendukung yang memiliki keahlian serta kompetensi di bidang pengurusan SPP-IRT. Hal ini dikarenakan, sampai saat ini, Dinas Tenaga Kerja dan PMPTSP Kota Malang belum memiliki tenaga pendukung yang kapabel dalam bidang tersebut. Sarana dan prasarana pendukung lainnya yang dapat berbentuk website terkait segala sesuatu yang berkaitan dengan pengurusan SPP-IRT di Dinas Tenaga Kerja dan PMPTSP Kota Malang pun belum dibangun, padahal dengan adanya website tersebut, pelaku IRTP yang akan menjadi pemohon SPP-IRT dapat mengetahui terkait syarat-syarat, alur mekanisme maupun jadwal serta kuota penyelenggaraan penyuluhan keamanan pangan yang menjadi syarat utama dalam pengajuan permohonan SPP-IRT. Selain itu, berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibu Woro Tanty Poerwandari selaku sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan PMPTSP Kota Malang, kendala lainnya adalah terkait dengan anggaran. Ia mengatakan bahwa⁶⁴ :

"Permasalahan mendasar yang sampai sekarang masih belum menemui jalan keluarnya yaitu dari anggaran, karena anggaran yang kurang merembet dan berpengaruh pada pemilik industri rumah tangga itu sendiri. Mungkin kedepannya kami bisa mencari investor untuk pendanaan pengurusan sertifikat ini. Kalau anggaran untuk pemberian sertifikat produksi pangan industri rumah tangga ini cukup untuk memproses seluruh pendaftar mungkin tidak akan terjadi penumpukan pendaftar seperti sekarang. Pendaftar juga tidak perlu menunggu lama untuk dapat jadwal penyuluhannya dan ketika sudah memperoleh sertifikat

⁶⁴ Hasil Wawancara dengan Ibu Woro Tanty Poerwandari selaku Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan PMPTSP Kota Malang.

pemilik industri sudah bisa memasarkan produknya tanpa terkendala lagi.”

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa permasalahan mendasar dari pelaksanaan kebijakan ini adalah anggaran yang tidak mencukupi. Sehingga terjadi penumpukan jumlah pendaftar, penumpukan jumlah pendaftar semakin tahun semakin meningkat. Terlihat bahwa pemilik industri rumah tangga sudah memiliki kesadaran untuk melakukan pengurusan, hendaknya hal tersebut juga disertai dengan peningkatan jumlah anggaran.

2) Kendala Eksternal

Hambatan eksternal adalah hambatan yang timbul dari ikut sertanya masyarakat dalam berjalannya suatu penegakan hukum. Dalam penelitian ini kendala eksternal yang berasal dari faktor masyarakat meliputi ketidaktahuan masyarakat terkait adanya pendelegasian wewenang penerbitan SPP-IRT dari yang semula berada pada Dinas Kesehatan Kota Malang, saat ini beralih ke Dinas Tenaga Kerja dan PMPTSP Kota Malang. Selain itu, kendala eksternal yang berasal dari masyarakat pada saat pengajuan permohonan penerbitan SPP-IRT adalah kurang lengkapnya berkas-berkas yang menjadi syarat permohonan. Sehingga proses penerbitan SPP-IRT oleh Dinas Tenaga Kerja dan PMPTSP Kota Malang menjadi terhambat bahkan tidak dapat diproses. Kendala eksternal lain adalah pandemic covid 19 yang secara tidak langsung menyebabkan hampir seluruh organ pemerintahan menerapkan kebijakan *refocusing* anggaran sebagai upaya percepatan penanganan covid 19.

3. Upaya yang dilakukan Dinas Tenaga Kerja dan PMPTSP Kota Malang dalam mengimplementasikan Pasal 3 Huruf B Angka 46 Peraturan Walikota Malang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan dari Walikota Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Menurut wawancara yang dilakukan penulis dengan Ibu Woro Tanty Poerwandari selaku sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan PMPTSP Kota Malang, upaya yang dilakukan Dinas Tenaga Kerja dan PMPTSP Kota Malang dalam mengatasi kendala yang terjadi dalam melaksanakan Pasal 3 Huruf B Angka 46 Peraturan Walikota Malang Nomor 3 Tahun 2020 yaitu :

1) Faktor Penegak Hukum

Dalam menangani kendala terkait masih terdapat Sumber Daya Manusia (SDM) atau pegawai yang tidak memiliki kemampuan maupun kompetensi terkait dengan hal-hal mengenai SPP-IRT, Dinas Tenaga Kerja dan PMPTSP Kota Malang berupaya untuk lebih aktif memberikan pelatihan bagi para pegawainya khususnya pada bagian loket pelayanan dan pengadministrasian izin SPP-IRT. Hal ini dikarenakan memang bagian tersebut yang menghadapi pemohon penerbitan SPP-IRT secara langsung serta berperan aktif dalam pemrosesan penerbitan izin SPP-IRT. Kemudian untuk mengatasi kekurangan pegawai yang kapabel dalam bidang pengurusan SPP-IRT, Dinas Tenaga Kerja dan PMPTSP Kota Malang pada saat ini sedang menjalani proses permintaan persetujuan kepada Walikota Malang guna membuka lowongan pegawai yang berkapabel dalam bidang tersebut.

2) Sarana atau Fasilitas Pendukung

Sarana atau fasilitas dapat tersedia dengan cukup sesuai kebutuhan yang diperlukan apabila didukung oleh sumber dana yang maksimal diberikan Pemerintah Daerah. Namun berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis masih terdapat beberapa sarana atau fasilitas dalam menunjang permohonan pengajuan penerbitan SPP-IRT yang belum tersedia cukup

atau belum maksimal. Belum maksimalnya ketersediaan beberapa sarana atau fasilitas tersebut dikarenakan dana dari Pemerintah Daerah Kota Malang memang belum optimal. Jadi, untuk mengatasi kendala ketersediaan sarana atau fasilitas, Dinas Tenaga Kerja dan PMPTSP Kota Malang akan mengusulkan kembali kepada Pemerintah Daerah Kota Malang agar anggaran untuk pengurusan penerbitan SPP-IRT dapat ditingkatkan dari dana APBD di samping mencari dana dari APBN.



BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil analisis dan penelitian mengenai Implementasi Pasal 3 Huruf B Angka 46 Peraturan Walikota Malang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan dari Walikota Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa :

1. Pelaksanaan Pasal 3 Huruf B Angka 46 Peraturan Walikota Malang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan dari Walikota Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu belum sepenuhnya terimplementasi dengan baik. Terdapat faktor-faktor kendala yang menghambat dalam pelaksanaan Pasal 3 Huruf B Angka 46 Peraturan Walikota Malang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan dari Walikota Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
2. Faktor-faktor kendala yang menghambat Implementasi Pasal 3 Huruf B Angka 46 Peraturan Walikota Malang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan dari Walikota Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yaitu:
 - a. Faktor penegak hukum
Pertama, Sumber Daya Manusia (SDM) di Dinas Tenaga Kerja dan PMPTSP Kota Malang masih rendah, karena masih terdapat pegawai yang tidak sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan dalam pengurusan SPP-IRT. Kedua, kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM) atau pegawai di Dinas Tenaga Kerja dan PMPTSP Kota Malang khususnya petugas loket

pelayanan dan pengadministrasian perizinan SPP-IRT yang memang tugasnya melakukan pemrosesan terhadap pengajuan permohonan penerbitan izin SPP-IRT.

b. Faktor sarana atau fasilitas pendukung

Belum optimal atau minimnya pendanaan dari pemerintah daerah Kota Malang menjadi hambatan untuk Dinas Tenaga Kerja dan PMPTSP Kota Malang dalam menyediakan beberapa sarana atau fasilitas yang menunjang pelaksanaan proses penerbitan SPP-IRT.

3. Dari hambatan yang ditemukan dalam Implementasi Pasal 3 Huruf B Angka 46 Peraturan Walikota Malang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan dari Walikota Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Tenaga Kerja dan PMPTSP Kota Malang memberikan upaya atau solusi untuk dapat melaksanakan proses penerbitan SPP-IRT, yakni diantaranya :

a. Faktor penegak hukum

Dinas Tenaga Kerja dan PMPTSP Kota Malang akan memberikan pelatihan bagi para pegawainya khususnya pada bagian loket pelayanan dan pengadministrasian izin SPP-IRT. Hal ini dikarenakan memang bagian tersebut yang menghadapi pemohon penerbitan SPP-IRT secara langsung serta berperan aktif dalam pemrosesan penerbitan izin SPP-IRT. Kemudian dalam hal masih terdapatnya kekurangan kekurangan pegawai yang kapabel dalam bidang pengurusan SPP-IRT, Dinas Tenaga Kerja dan PMPTSP Kota Malang akan membuka lowongan pegawai namun untuk saat ini masih menunggu persetujuan dari Walikota Malang.

b. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Dinas Tenaga Kerja dan PMPTSP Kota Malang akan mengusulkan kembali kepada Pemerintah daerah Kota

Malang agar anggaran untuk Dinas Tenaga Kerja dan PMPTSP Kota Malang dalam hal pengurusan penerbitan izin

SPP-IRT dapat ditingkatkan dari dana APBD di samping mencari dana dari APBN.

B. Saran

Dari penelitian yang telah diteliti oleh penulis, maka penulis memberikan saran untuk Pemerintah Kota Malang, Dinas Tenaga Kerja dan PMPTSP Kota Malang, dan masyarakat Kota Malang agar lebih berperan aktif dalam mengimplementasikan Pasal 3 Huruf B Angka 46 Peraturan Walikota Malang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan dari Walikota Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Saran dari penulis adalah :

1. Untuk Pemerintah Daerah Kota Malang, agar lebih meningkatkan anggaran dana untuk Dinas Tenaga Kerja dan PMPTSP Kota Malang dimana anggaran tersebut digunakan untuk penyediaan sarana atau fasilitas yang mendukung dalam melaksanakan pemrosesan pengajuan permohonan penerbitan SPP-IRT yang diajukan oleh pelaku IRTP selaku masyarakat Kota Malang.
2. Untuk Dinas Tenaga Kerja dan PMPTSP Kota Malang, agar lebih meningkatkan kualitas pelayanannya, mengingat pada saat ini izin merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi masyarakat, tidak terkecuali izin SPP-IRT bagi para pelaku IRTP di Kota Malang. Selain itu, Dinas Tenaga Kerja dan PMPTSP Kota Malang juga harus lebih aktif berkoordinasi, baik dengan Pemerintah Daerah Kota Malang maupun dinas-dinas terkait seperti Dinas Kesehatan Kota Malang mengenai hal-hal apa saja yang perlu diperbaiki agar dapat meningkatkan pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan PMPTSP Kota Malang.
3. Untuk masyarakat Kota Malang, agar masyarakat juga lebih dapat berperan aktif memberikan saran dan masukan dalam bentuk

pengawasan, pengaduan atau keluhan baik kepada pemerintah Kota Malang maupun kepada Dinas Tenaga Kerja dan PMPTSP Kota Malang mengenai pelayanan perizinan SPP-IRT. Hal ini dimaksudkan agar kebutuhan perizinan bagi kegiatan usaha masyarakat dapat terpenuhi sehingga dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat selaku pemohon.



Daftar Pustaka

Buku

Andrian Sutedi, **Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik**, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

Burhan Bungin, **Analisis Data Penelitian Kualitatif**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.

Erwan Agus Purwanto, **Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia**, Gava Media, Yogyakarta, 2012.

Edward III, George C (edited), **Public Policy Implementing**, Jai Press Inc, London England, 1990.

Fahmi Wibawa, **Panduan Praktis Perizinan Usaha Terpadu**, Grasindo, Jakarta, 2007.

Guntur Setiawan, **Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan**, Balai Pustaka, Jakarta, 2004.

Harsono Hanifah, **Implementasi Kebijakan Dan Politik**, Grafindo Jaya, Jakarta, 2002.

HR Ridwan, **Hukum Administrasi Negara**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.

Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, **Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik**, Nuansa Cendekia, Bandung, 2009.

Kimbal.R.W, **Modal Sosial dan Ekonomi Industri Kecil : Sebuah Studi Kualitatif**, Penerbit Depublis, Yogyakarta, 2015.

Lexy J. Moleong, **Metodologi Penelitian Kualitatif**, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2010.

Mulyadi, **Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik : Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik**, Alfabeta CV, Bandung, 2015.

Prajudi Atmosudirdjo, **Hukum Administrasi Negara**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.

Ridwan, **Metode & Teknik Penyusunan Tesis**, Alfabeta, Bandung, 2006.

Suharsimi Arikunto, **Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek**, Rineka Cipta, Jakarta, 2002.

Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI Press, Jakarta, 2010.

Tachjan, **Implementasi Kebijakan Publik**, Truen RTH, Bandung, 2006.

Tabrani Rusyan, **Pendekatan dalam Proses Belajar Mengajar**, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 1992.

Tulus T.H Tambunan, **Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia (Beberapa Isu Penting)**, Salemba Empat, Jakarta, 2002.

Usman Norman, **Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum**, CV Sinar Baru, Bandung, 2002.

Waluyo, **Manajemen Publik (Konsep, Aplikasi, Dan Implementasi) Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah**, Mandarmaju, Bandung, 2007.

Y. Sri Pudyatmoko, **Perizinan Problem dan Upaya Pembetulan**, Grasindo, Yogyakarta, 2009.

Jurnal

Harlan Evan Kaporu, **Implementasi Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum**, Jurnal Nominal, Volume III, Nomor 1, Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Nusa Cendana, NTT, 2014.

Lie Liana, **Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil Sebagai Sarana Memperkokoh Struktur Perekonomian Nasional**, Jurnal Bisnis dan Ekonomi, Volume 15, Nomor 2, Fakultas Ekonomi Universitas Stikubank Semarang, Semarang, 2008.

Mhd. Taufik dan Isril, **Implementasi Peraturan Daerah Badan Permasyarakatan Desa**, Jurnal Kebijakan Publik, Volume 4, Nomor 2, FISIP Universitas Riau, Pekanbaru, 2013.

Saifuddin Zuhri, **Analisis Pengembangan Usaha Kecil Home Industri Sangkar Ayam Dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan**, Jurnal

Manajemen dan Akuntansi, Volume 2, Nomor 3, Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Darul Ulum Lamongan, Lamongan, 2013.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 **tentang Pangan.**

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 **tentang
Administrasi Pemerintahan.**

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 **tentang
Pemerintahan Daerah.**

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 tentang **Badan
Pengawas Obat dan Makanan.**

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 22
Tahun 2018 **tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi
Pangan Industri Rumah Tangga.**

Peraturan Walikota Malang Nomor 03 Tahun 2020 **tentang Pendelegasian
Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Dari Walikota
Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu.**

Internet

Badan Pusat Statistik, 2020, **Industri Besar dan Sedang** (*online*),
<https://www.bps.go.id/subject/9/industri-besar-dan-sedang.html>, (24
September 2020), 2020.

LAMPIRAN**Lampiran 1 Kuesioner Penelitian****KUESIONER PENELITIAN**

Judul Penelitian	:	Implementasi Pasal 3 Huruf B Angka 46 Peraturan Walikota Malang Nomor 3 Tahun 2020 Terkait Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga.
Lokasi Penelitian	:	Dinas Tenaga Kerja dan PMPTSP Kota Malang.

Daftar Pertanyaan :

1. Apakah Anda mengetahui bahwa terdapat pendelegasian wewenang terkait pengurusan izin kesehatan dari Walikota kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan PMPTSP Kota Malang?

YA

TIDAK

ABSTAIN

2. Kapan Anda mengetahui bahwa terdapat pendelegasian wewenang terkait pengurusan izin kesehatan dari Walikota kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan PMPTSP Kota Malang?

Sosialisasi Bersama
Walikota

Rapat Internal Disnaker
PMTSP Kota Malang

ABSTAIN

3. Apakah Anda mengetahui tentang SPP-IRT?

YA

TIDAK

ABSTAIN

4. Jika iya, media apa yang Anda gunakan untuk mengetahui syarat-syarat serta tata cara pengurusan izin SPP-IRT?

Pedoman/ Peraturan
Walikota

Internet/ Sumber Lain
(Mencari tahu informasi
secara mandiri)

ABSTAIN

5. Apakah pendelegasian wewenang pengurusan izin SPP-IRT kepada Disnaker PMPTSP juga disertai dengan faktor pendukung?

YA	TIDAK	ABSTAIN
----	-------	---------

6. Jika iya, faktor pendukung apa yang menyertai pendelegasian wewenang pengurusan izin SPP-IRT tersebut?

Sumber Daya Manusia	Sarana Prasarana	ABSTAIN
------------------------	------------------	---------

7. Hambatan apa yang paling berpengaruh terhadap Implementasi Implementasi Pasal 3 Huruf B Angka 46 Peraturan Walikota Malang Nomor 3 Tahun 2020 Terkait Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga di Disnaker PMPTSP Kota Malang?

Hambatan Internal	Hambatan Eksternal	ABSTAIN
- SDM	- Pandemi Covid	
- Sarana	19	
Prasarana	- Pengetahuan	
- Anggaran	Masyarakat	
	terkait dengan	
	SPP-IRT	

Lampiran 2 Daftar Responden Penelitian

DAFTAR RESPONDEN PENELITIAN

No.	Nama	:	Jabatan
1	Ir. TITIS ANDAYANI, MM	:	Kabid. Tenaga Kerja
2	LINDA DESRIWATI, SKM	:	Kabid. Pengembangan Iklim Penanaman Modal
3	Drs. R. DANDUNG JULHARDJANTO, MT	:	Kabid. Pengendalian, Pengaduan, Data dan Informasi
4	YUNI LESTARI, ST, M.Si	:	Kabid Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Ekonomi, Pariwisata dan Sosial Budaya
5	TRI SOEKMA WIDAJATI, SE, MM	:	Kabid Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Pekerjaan Umum
6	DWI PURWATI, SE, MM	:	Kasubag Perencanaan
7	REMAT	:	Kasubbag. Keuangan
8	MUSARROFAH, S.Pt	:	Kasubag Umum dan Kepegawaian
9	RINI JUMIATI, A.Ks	:	Kasie Pelatihan dan Produktifitas Kerja
10	TJURATNA, SE	:	Kasie Hubungan Industrial
11	DEMMY ARIAMADA, SE	:	Kasie Pengembangan Potensi Penanaman Modal Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal
12	SAMSURIZAL, SE, M.Si	:	Kasie Promosi Penanaman Modal Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal
13	Dra. Ec. MAIVA RUSLINDA	:	Kasie. Pengendalian dan Pelaporan Bidang Pengendalian, Pengaduan, Data dan Informasi
14	Drs. RUDI CAHYONO CATUR UTOMO	:	Kasie. Data dan Informasi Bidang Pengendalian, Pengaduan, Data dan Informasi

15	IDA NOERINI, SE	:	Kasie. Kebijakan, Pengaduan dan Penyuluhan Layanan Bidang Pengendalian, Pengaduan, Data dan Informasi
16	Dra. NUR CHAMIDAH	:	Kasie. Verifikasi dan Validasi Bidang Perizinan dan Nonperizinan Ekonomi, Pariwisata dan Sosial Budaya
17	RULLYANA PRIMASTUTI, S.Sos, M.Si	:	Kasie. Penetapan dan Penerbitan Bidang Perizinan dan Nonperizinan Ekonomi, Pariwisata dan Sosial Budaya
18	Drs. MOCHAMMAD JUSUF	:	Kasie. Verifikasi dan Validasi Bidang Perizinan dan Nonperizinan Pekerjaan Umum
19	BAMBANG NURMAWAN, SH, M.Hum	:	Kasie. Penetapan dan Penerbitan Bidang Perizinan dan Nonperizinan Pekerjaan Umum
20	UMI KHOIRIYAH, S.Sos	:	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Subbagian Perencanaan Sekretariat
21	TITIK ERNIATI, SE	:	Analisis Iklim Usaha dan Kerjasama Seksi Perencanaan Penanaman Modal Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal
22	ISNIAR YUFRIDA, SE.	:	Analisis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Seksi Penetapan dan Penerbitan Perizinan dan Nonperizinan Ekonomi, Pariwisata dan Sosial Budaya
23	WIWIK RAHMAWATI, SE, MM	:	Analisis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Seksi Verifikasi dan Validasi Perizinan dan Nonperizinan Ekonomi, Pariwisata dan Sosial Budaya
24	INTANIA MAYASARI, ST	:	Analisis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Seksi Verifikasi dan Validasi Perizinan dan Nonperizinan Pekerjaan Umum
25	EKA YUDHA SUDRAJAD, S. AB	:	Pengantar Kerja Muda Seksi Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja Bidang Tenaga Kerja

26	YUANNA SYAFARIATI, SE	:	Analisis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Seksi Penetapan dan Penerbitan Perizinan dan Nonperizinan Pekerjaan Umum
27	RIZKI MARDANI K, SH	:	Analisis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Seksi Pengendalian dan Pelaporan Bidang Pengendalian, Pengaduan, Data dan Informasi
28	SUHARYANIK, SM	:	Analisis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Seksi Penetapan dan Penerbitan Perizinan dan Nonperizinan Ekonomi, Pariwisata dan Sosial Budaya
29	FRANSISKA IING MARIANDINI, SE	:	Penata Laporan Keuangan Subbagian Keuangan Sekretariat
30	HERLINA, ST	:	Analisis Kompetensi dan Kualifikasi Ketenagaan Seksi Pelatihan dan Produktifitas Kerja Bidang Tenaga Kerja
31	WIWIK WIJAYANTI, SE	:	Penyusun Rencana Kebutuhan Sarana dan Prasarana Subbag Umum dan Kepegawaian Sekretariat
32	MEI PUJIANTO, SH	:	Analisis Penanaman Modal Seksi Perencanaan Penanaman Modal Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal
33	ERLIN MAISAR, S.Sos	:	Bendahara Subbagian Keuangan Sekretariat
34	SABATUS PONCOKANKO	:	Pengadministrasi Perizinan Seksi Penetapan dan Penerbitan Perizinan dan Nonperizinan Ekonomi, Pariwisata dan Sosial Budaya
35	MU'AWANAH, SE	:	Analisis Penyuluhan dan Layanan Informasi Seksi Kebijakan dan Penyuluhan Layanan Pengendalian, Data dan Informasi
36	BAMBANG SUKOPRPTO	:	Pengadministrasi Perizinan Seksi Verifikasi dan Validasi Perizinan dan Nonperizinan Pekerjaan Umum
37	VIRDA ARDIYANIE, SH	:	Analisis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Seksi Verifikasi dan Validasi Perizinan dan Nonperizinan Ekonomi, Pariwisata dan Sosial Budaya

38	SUDIYANTO	:	Pengadministrasi Perizinan Seksi Verifikasi dan Validasi Perizinan dan Nonperizinan Ekonomi, Pariwisata dan Sosial Budaya
39	MANAKE BAMBANG TRIAWAN, SE	:	Pengantar Kerja Pertama Seksi Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja Bidang Tenaga Kerja
40	ASYIK MUSYAFFA, S.AP	:	Pengolah Data Seksi Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja Bidang Tenaga Kerja
41	CARTER WIRA SUTEJA, SH	:	Mediator Hubungan Industrial Pertama Seksi Hubungan Industrial Bidang Tenaga Kerja
42	ARIYANTO SETYO P, ST	:	Analisis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Seksi Verifikasi dan Validasi Perizinan dan Nonperizinan Pekerjaan Umum
43	ENDRAWAN S PS, SE	:	Analisis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Seksi Pengendalian dan Pelaporan Bidang Pengendalian, Data dan Informasi
44	RAFIKA ULFIANATUZ Z, SH	:	Analisis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Seksi Penetapan dan Penerbitan Perizinan dan Nonperizinan Pekerjaan Umum
45	MOCHAMAD ANSORI	:	Pengadministrasi Perizinan Seksi Verifikasi dan Validasi Perizinan dan Nonperizinan Ekonomi, Pariwisata dan Sosial Budaya
46	SULIESTIANING ROCHANA, SE	:	Analisis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Seksi Penetapan dan Penerbitan Perizinan dan Nonperizinan Ekonomi, Pariwisata dan Sosial Budaya
47	ABD. RAHMAN, SE	:	Pengelola Bahan Ketatalaksanaan Pelayanan Perizinan Seksi Kebijakan dan Penyuluhan Layanan Bidang Pengendalian, Data dan Informasi
48	ANIK WIJAYA, SE	:	Analisis Data dan Informasi Seksi Promosi Penanaman Modal Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal

49	ADI MINTO NUGROHO, SE	:	Analisis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Seksi Penetapan dan Penerbitan Perizinan dan Nonperizinan Pekerjaan Umum
50	YOHANNES KRISDIANTO	:	Pengadministrasi Akses Permodalan Seksi Promosi Penanaman Modal Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal
51	SABARIYANTI, SH	:	Analisis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Seksi Penetapan dan Penerbitan Perizinan dan Nonperizinan Ekonomi, Pariwisata dan Sosial Budaya
52	HENDIK SISDWI KUSUMAWANTO, S.Ak	:	Analisis Data dan Informasi Seksi Data dan Informasi Bidang Pengendalian, Pengaduan, Data dan Informasi
53	MOHAMMAD ILYAS	:	Pengadministrasi Perizinan Seksi Verifikasi dan Validasi Perizinan dan Nonperizinan Pekerjaan Umum
54	SUKADI	:	Pengadministrasi Perizinan Seksi Penetapan dan Penerbitan Perizinan dan Nonperizinan Pekerjaan Umum
55	SULIS WIYONO	:	Pengadministrasi Perizinan Seksi Penetapan dan Penerbitan Perizinan dan Nonperizinan Pekerjaan Umum
56	AMAT JUNAEDI	:	Pengadministrasi Penerimaan Subbagian Keuangan Sekretariat
57	IMAM WAHYUDI	:	Pengadministrasi Umum Subbag Umum dan Kepegawaian Sekretariat
58	SLAMET HARI SISWANTO	:	Pengadministrasi Perizinan Seksi Verifikasi dan Validasi Perizinan dan Nonperizinan Ekonomi, Pariwisata dan Sosial Budaya
59	JUMA'ATI	:	Pengadministrasi Kepegawaian Subbag Umum dan Kepegawaian Sekretariat
60	RONI YUSUF	:	Pengadministrasi Umum Subbag Umum dan Kepegawaian Sekretariat

61	HERBINU IRAWAN	:	Pengadministrasi Perizinan Seksi Penetapan dan Penerbitan Perizinan dan Nonperizinan Ekonomi, Pariwisata dan Sosial Budaya
62	JUMIAT	:	Pengadministrasi Umum Subbag Umum dan Kepegawaian Sekretariat
63	SUWANDI	:	Pengadministrasi Perizinan Seksi Verifikasi dan Validasi Perizinan dan Nonperizinan Ekonomi, Pariwisata dan Sosial Budaya
64	HASANUDIN JUNAIDI	:	Pengadministrasi Perizinan Seksi Penetapan dan Penerbitan Perizinan dan Nonperizinan Pekerjaan Umum
65	YUHANA CRISTIOWATI	:	Pengadministrasi Keuangan Subbagian Keuangan Sekretariat
66	IDA RUDI HARTONO	:	Pengadministrasi Umum Subbag Umum dan Kepegawaian Sekretariat
67	KASTYANTO	:	Pengadministrasi Umum Subbag Umum dan Kepegawaian Sekretariat
68	ZAENAL ARIF	:	Pengadministrasi Perizinan Seksi Penetapan dan Penerbitan Perizinan dan Nonperizinan Pekerjaan Umum
69	SOLIJI	:	Pramu Bakti Subbag Umum dan Kepegawaian Sekretariat

Lampiran 3 Foto Kegiatan Penelitian Penulis



